

TUGAS PERTEMUAN KETIGA
SEMESTER A1
ANGKATAN KE XXXIV R2 REGULER A

=====

JENJANG PENDIDIKAN : STRATA DUA (S2)
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN
MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN
DOSEN : Dr.BAKTI SETYADI, S.E, M.M, Ak, CA
HARI/TANGGAL : SABTU, 7 DESEMBER 2019

Soal Studi Kasus:

Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihinya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

PERTANYAAN: Berikan analisis anda atas kasus di atas melalui:

1. Latar belakang kasus
2. Permasalahan kasus
3. Saran dan rekomendasi

Uraikan pendapat anda bagaimana seharusnya PT.KAI menyelesaikan permasalahan kasus di atas.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Nama : Boney Adrian

NIM : 192510019

Jawaban UAS Manajemen Keuangan

1. Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangannya, banyak hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dilakukan secara tidak layak sehingga laporan keuangannya menjadi tidak wajar. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya serta merugikan bagi pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Tidak hanya itu saja, pelaporan keuangan yang tidak wajar dalam suatu perusahaan juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi.

2. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pembahasan permasalahan kasus :

a) Analisis Question Approach:

- **Profitable**

Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

- **Legal**

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

- **Right**

a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.

b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

- **Sustainable Development**

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

b) Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

a. Egoisme etis.

Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.

b. Utilitarianisme.

Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.

c. Deontologi.

Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

d. Hak.

Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan

kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan

e. Keutamaan.

Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa hal yang dilanggar yaitu :

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

c) Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri

kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

d) Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3. Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Boney Adrian

NIM : 192510019

1. Latar belakang kasus

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan

Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan diatas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

- ✓ Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp.

95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- ✓ Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- ✓ Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- ✓ Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejangalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis :

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran dan rekomendasi untuk Manajemen PT KAI

Setelah melihat dan menganalisa dari permasalahan dan kasus di Manajemen PT KAI maka hal yang harus dilakukan untuk sebuah evaluasi dan perbaikan, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Sekaligus melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

- Mengatur dan memenej kembali dalam perusahaan terkhusus dalam bidang laporan keuangan sehingga laporan selanjutnya tersaji dalam keadaan yang baik dan benar terhindar dari segala manipulasi dan data-data yang fiktif.
- Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Menurut asumsi kami, bahwa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan adalah hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa

menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Seimbangnya akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : Cash flow (arus kas) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang dihasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin berperilaku secara etis dan baik, dan

banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing- masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

Nama : Diah Ayu Setianingrum
NIM : 192510046
Kelas/Angkatan : A/34
Dosen : Dr. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

UAS MANAJEMEN KEUANGAN

STUDI KASUS: DILEMA SEORANG PROFESIONAL KEUANGAN

1. Latar Belakang Kasus

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi melakukan kecurangan atau *fraud* dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan suatu penipuan dan menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor dan stakeholder, bahkan pemerintah. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Banyak hal-hal yang terjadi yang berkaitan dengan keuangan dilakukan secara tidak layak atau *Proper*, seperti pencatatan tanpa bukti dan melakukan *markup* harga, pembuatan laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga manipulasi data penjualan yang berada di komputer kantor. Hal ini menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak dan berpotensi menjadi perbuatan kriminal.

2. Permasalahan Kasus

Permasalahan pada kasus diatas adalah sebagai berikut.

- a. Perusahaan membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak yang membuat Pemerintah merugi.
- b. Memanipulasi laporan keuangan dan data penjualan agar membuat perusahaan dinilai memiliki kinerja keuangan yang baik, padahal pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan atau kecurangan dalam penyusunan pembukuannya.

3. Saran dan Rekomendasi

Saran saya untuk manajemen perusahaan, akan lebih baik jika pihak manajemen meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kesalahan kembali di masa datang. Selain itu, membuat masukan kepada manajemen perusahaan baik lisan maupun tulisan terhadap dampak yang akan timbul dimasa mendatang apabila *error and Fraud* tidak segera diperbaiki dan saya akan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut dan mencari perusahaan lain yang manajemennya lebih baik dari pada perusahaan sekarang.

Rekomendasi untuk kasus tersebut.

- a. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik;
- b. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi;
- c. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan;
- d. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan;
- e. *Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Corporate governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang;
- f. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian;

- g. *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan;
- h. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset;
- i. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal;
- j. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan;
- k. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Diah Ayu Setianingrum
NIM : 192510046
Kelas/Angkatan : A/34
Dosen : Dr. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

UTS MANAJEMEN KEUANGAN

STUDI KASUS: Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

1. Latar Belakang Kasus

PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa transportasi angkutan darat yang produk jasanya yaitu sarana transportasi meliputi angkutan penumpang dan barang yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, PT KAI terdeteksi adanya manipulasi dalam penyajian laporan keuangan yang terbit pada Tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6,90 Milyar. Namun, setelah dicermati, Perusahaan BUMN itu harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 Milyar. Hal ini disebabkan oleh pajak dari pihak ketiga yang tidak dapat ditagih selama tiga tahun. Diduga manipulasi laporan keuangan ini telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Permasalahan Kasus

Permasalahan yang ada pada kasus tersebut adalah berawal dari kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan yang dilakukan oleh manajemen PT KAI. Laporan Keuangan yang digunakan sebagai alat pertanggung jawaban manajemen juga sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan keputusan, namun pada kasus ini pihak manajemen telah memanipulasi laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya.

PT KAI juga telah melanggar prinsip Etika Profesi yakni Prinsip Otonomi dan Prinsip Keadilan.

Selain itu, Pajak pihak ketiga yang tidak dapat ditagih atau piutang yang tidak tertagih tersebut dinyatakan oleh PT KAI sebagai pendapatan. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut. Padahal, berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih tersebut tidak bisa dikelompokkan sebagai aset. Namun, di PT KAI ada kekeliruan pencatatan penerimaan perusahaan.

Pihak akuntan juga berperan dalam kesalahan ini karena sejak Tahun 2004 laporan keuangan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai auditor, yang sebelumnya melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan. Hal itu pula menimbulkan anggapan bahwa kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan PT KAI telah melakukan Kesalahan dan telah melakukan pelanggaran kode etik profesi akuntansi selain itu Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI.

3. Saran dan Rekomendasi

Saran saya untuk manajemen PT KAI, akan lebih baik jika melakukan koreksi salah saji atas pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai pendapatan. Selain itu, pihak manajemen meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang.

Saran saya untuk Kantor Akuntan Publik dan rekan-rekan akan lebih baik jika melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku

konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi, melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat, melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas laporan keuangan tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Rekomendasi saya untuk kasus tersebut.

- a. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi;
- b. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik;
- c. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan;
- d. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan;
- e. *Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Corporate governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang;
- f. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian;
- g. *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan;

- h. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan atautkah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset;
- i. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal;
- j. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan;
- k. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

NAMA : ELIYUSMA HARTUTI, SE
NIM : 192510047
KELAS : REGULER A/34
MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN

SOAL STUDI KASUS : “DILEMA PROFESIONAL KEUANGAN”

1. LATAR BELAKANG KASUS :

Berdasarkan pengalaman tempat saya bekerja dulu terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

2. PERMASALAHAN KASUS :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis **question approach** untuk membahas permasalahan kasus, yaitu :

a. Profitable

Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

b. Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berbentuk perseroan terbuka
- Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

c. Right

- Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

d. Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

TEORI ETIKA YANG DILANGGAR :

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting.

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud.

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

PRINSIP ETIKA YANG DILANGGAR :

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

SIKAP YANG DIAMBIL :

1) Manajemen Perusahaan

Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan pengarahan kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
3. Memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan.
4. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
5. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
6. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
7. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
8. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

NAMA : ELIYUSMA HARTUTI, SE
NIM : 192510047
KELAS : REGULER A/34
MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN

Latar Belakang Kasus :

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

- Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
- Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai

kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

- Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Permasalahan Kasus :

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai

- Masalah piutang PPN.
Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.
- Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.
Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.
- Masalah persediaan dalam perjalanan.
Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.
- Masalah uang muka gaji.
Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.
- Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Saran dan Rekomendasi :

- Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

- Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.
- Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.
- Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.
- Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi. Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

- Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran. Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai

masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing. Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit. Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

- Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

1. Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

2. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

3. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

- Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran

dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Nama : Fahri Alfath
NIM : 192510029
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen : Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen

JAWABAN UAS

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Tempat saya bekerja dalam suatu Perusahaan terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan criminal atau kecurangan

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak

hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.

- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

- a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting.

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud.

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi

laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Berencana untuk ambil tindakan melapor ke pihak-pihak yang bisa di ajak kerjasama dalam perusahaan tersebut
- b. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- c. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Memberikan informasi akan baiknya dalam pembuatan laporan keuangan secara fakta dan bukan fiksi.
2. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
3. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
4. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
5. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
6. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
7. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
8. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

9. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
10. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
11. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.
12. Melakukan training dan motivasi tentang baiknya sebuah kejujuran bekerja dll dalam sebuah perusahaan baik itu dengan memanggil pembicara dari kalangan Agama, motivator dan lain sebagainya.

(*Alhamdulillah*)

SOAL DAN JAWABAN

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

SEMESTER A1

ANGKATAN KE XXXIV R2 REGULER A

JENJANG PENDIDIKAN : STRATA DUA (S2)

MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN (MM-0006)

DOSEN : Dr. H. BAKTI SETYADI, S.E, M.M, Ak, CA



OLEH :

NAMA MAHASISWA : FAHRI ALFATH

NIM : 192510029

PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN

KONSENTRASI : MANAJEMEN PENDIDIKAN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

TAHUN 2019

Soal Studi Kasus:

Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

PERTANYAAN:

Berikan analisis anda atas kasus di atas melalui:

1. Latar belakang kasus
2. Permasalahan kasus
3. Saran dan rekomendasi

Uraikan pendapat anda bagaimana seharusnya PT.KAI menyelesaikan permasalahan kasus di atas.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

(Bismillah...)

Jawaban Studi Kasus:

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

1. Latar belakang kasus

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan diatas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis :

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran dan rekomendasi untuk Manajemen PT KAI

Setelah melihat dan menganalisa dari permasalahan dan kasus di Manajemen PT KAI maka hal yang harus di lakukan untuk sebuah evaluasi dan perbaikan, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- 1) Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.

- 2) Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Sekaligus melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.
- 3) Mengatur dan memenej kembali dalam perusahaan terkhusus dalam bidang laporan keuangan sehingga laporan selanjutnya tersaji dalam keadaan yang baik dan benar terhindar dari segala manipulasi dan data-data yang fiktif.
- 4) Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- 5) Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
- 6) Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik.
- 7) Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- 8) Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas mengisi posisi jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis.
- 9) Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

Daftar Pustaka :

- Agoes, Sukrisno dan I Cendik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Leonard J. Brooks. Business & Professional Ethics for Accountans. South Western Collage Publishing. 2004
- Website <https://www.academia.edu/24848195>
- IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia. 1998

JAWABAN DARI SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

- **Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan ?**

Jawab :

Menurut asumsi kami, bahwa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan adalah hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

- **Apa Manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan :**

Jawab :

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan

lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Jawab :

Seimbangny akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : Cash flow (arus kas) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya.

Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Jawab :

Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang di hasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin berperilaku secara etis dan baik, dan banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing- masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

Bisa di simpulkan bahwa, benar tujuan di didrikan perusahaan untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. namun sebenarnya menjaga aset-aset perusahaan itu dengan menejemen resiko yang baik yang dikelola pengurus perusahaan, itu jauh lebih utama dibandingkan dengan pencapaian dalam mencari laba dengan profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan itu. Sekian ...

(Alhamdulillah)

Nama : Faizal
NIM : 192510043
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Faizal
NIM : 192510043
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UTS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihinya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

Latar Belakang Kasus :

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum

dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

PERMASALAHAN KASUS

Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasikan terjadinya manipulasi.

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari "laba semu" tersebut.
- b. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Legal

- (1). PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal "Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:
 - a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek
- (2) **KAP S. Manan & Rekan** melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

- a. Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah.
- b. Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

Right

- a. Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus).

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. **Kepentingan Publik ;**

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut.

c. **Integritas ;**

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. **Objektifitas ;**

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT. KAI.

e. **Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;**

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.

f. **Perilaku profesional ;**

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam

melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Namun, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Seharusnya berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen PT KAI

- a. Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai aset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- b. Meminta maaf kepada *stakeholders* melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang.

2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan

- a. Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi mereka
- b. Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat
- c. Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Saran dan Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
8. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
9. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
10. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya tidak "berkenan" dengan orang

tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

11. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling berkaitan satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya.

Manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non Keuangan?

- Mengurangi pengeluaran (biaya) dalam proses bisnis
 - Mengatur arus kas
 - Menghitung pajak
 - Memaksimalkan proses bisnis dengan tujuan mencapai laba maksimal
 - Sebagai alat pengambil keputusan (decision maker) dalam menentukan kebijakan perusahaan ke depan. Misal jika manajer operasional membutuhkan dana maka perlu untuk melihat ketersediaan dana perusahaan dan berkomunikasi dengan manajer keuangan, begitu juga dengan manajer pemasaran jika membutuhkan dana untuk promosi kegiatan marketing perusahaan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan !

Posisi kas yang mencukupi harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan menjadi tidak terjamin pada bisnis yang mengalami kehabisan kas. Ketika hal tersebut terjadi,

perusahaan tidak mampu membayarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan berikutnya. Tidak mempunyai kas yang cukup tidak baik bagi perusahaan dalam berbisnis, namun sebaliknya menyimpan kas terlalu banyak juga sama kurang baiknya. Kas yang tidak berputar dalam sebuah proses kegiatan berbisnis tidak dapat memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan (menjadi *idle money*). Dan dapat berdampak investor juga ragu untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemilikinya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Meskipun upaya memaksimalkan laba merupakan tujuan yang logis bagi setiap perusahaan, tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba, melainkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*stock holder's wealth*) atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*).

Kekayaan pemegang saham adalah perkalian antara harga saham per lembar dan jumlah saham yang beredar. Ini berarti bahwa kekayaan pemegang saham akan tercermin dari nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh harga saham perusahaan bersangkutan di bursa saham. Dengan demikian, maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan (harga saham) memiliki arti yang benar-benar sama. Perumusan maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai tujuan pada akhirnya akan memudahkan pengukuran kinerja suatu perusahaan.

Menurut Koch & McDonald, pengukuran kinerja suatu perusahaan yang bertujuan memakmurkan para pemegang saham dapat digunakan tiga metode alternatif :

- Analisis profitabilitas dari segmen/lini dari perusahaan, merupakan merupakan indikator yang sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauhmana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor.
- *Economic Value Added*, merupakan tujuan korporat untuk meningkatkan nilai (value) dari modal (capital) yang investor dan pemegang saham telah tanamkan dalam operasi usaha dan merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan biaya modal (cost of capital), disamping itu pula EVA juga dapat digunakan sebagai indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi.

- *Balance Score Card*. Dalam suatu bisnis yang bertujuan memaksimalkan kekayaan para pemiliknya, ditunjukkan dengan dinamika dan hubungan dari tiga keputusan manajemen dasar, yaitu keputusan investasi, keputusan operasi dan keputusan pendanaan.

Selain itu, manajer keuangan di perusahaan membuat keputusan untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham membeli saham perusahaan untuk memperoleh keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Oleh karena itu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik sisa (*residual owner*) di perusahaan. Mereka akan memperoleh sesuatu dari perusahaan dalam urutan akhir setelah pegawai, pemasok, dan kreditur sehingga apabila kekayaan pemegang saham meningkat berarti kekayaan pihak lainnya dalam perusahaan juga meningkat.

Ada dua alasan yang mudah dipahami mengapa tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan, bukan maksimalisasi laba:

- ***Laba tidak menunjukkan arus kas***. Laba yang disajikan pada laporan laba-rugi bukanlah besaran yang menunjukkan arus kas, sehingga jika laba suatu perusahaan Rp 5 miliar, hal itu sama sekali tidak menyatakan bahwa terdapat arus kas sebesar jumlah yang sama. Dalam manajemen keuangan, pengambilan keputusannya justru didasarkan atas arus kas (cashflow). Artinya, keputusan keuangan dinilai benar manakala keputusan itu meningkatkan arus kas bersih yang diterima perusahaan pada masa mendatang.
- ***Laba tidak mempertimbangkan waktu dan risiko***. Andai kata proyek A dan B akan menghasilkan laba pada dua tahun mendatang: Laba A Rp 5 miliar pada tahun pertama dan Rp5 miliar pada tahun kedua, sedangkan laba B Rp 0 rupiah pada tahun pertama dan Rp 10 miliar pada tahun kedua, rata-rata laba per tahun kedua proyek jelas sama, yakni Rp 5 miliar. Proyek mana yang layak dipilih? Berdasarkan pendekatan maksimalisasi laba, kita akan bersikap indifferen terhadap kedua proyek.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Cobaanda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Jawab :

1. Dalam mempelajari manajemen keuangan diperlukan pengetahuan akutansi. Namun demikian manajemen keuangan dan akutansi mempunyai perbedaan yang mendasar. Pada akutansi yang dipelajari adalah proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan, yang hasil akhirnya adalah suatu laporan keuangan dalam bentuk: (1) neraca (balance sheet), (2) laporan laba/rugi (income statement), serta (3) laporan arus kas (statement of cash flows). Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, dan neraca dapat dianalogikan sebagai sebuah foto yang diambil pada suatu saat karena hanya menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan laba/rugi menggambarkan besarnya penjualan, biaya dan laba yang terjadi selama satu periode akutansi, misalkan satu tahun. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan penggunaan arus kas selama peiode akutansi.

Manajemen keuangan dan akutansi memfokuskan perhatian pada aktiva dan pasiva perusahaan, keduanya berbeda dalam hal periode waktu. Akutansi, dengan penekanan pada aspek tinjauan (review), pada umumnya memiliki wawasan historis (apa yang telah terjadi). Salah satu tujuan utamanya adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Akuntan membuat neraca untuk menentukan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, atau melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk

menguji Manajemen keuangan dengan penekanan pada pembuatan keputusan lebih memfokuskan pada masa depan (future). Tugas manajemen keuangan adalah memanfaatkan pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini.

2. Permasalahan pada arus kas sering terjadi pada bisnis kecil dan menengah karena masih banyak yang tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik sehingga banyak pengeluaran dan pemasukan (perbedaan penerimaan dan pendapatan dalam akuntansi) yang tidak diketahui. Para pemilik bisnis kecil biasanya merasa malas atau menyepelekan pembuatan laporan keuangan karena skala dan omzet usaha masih kecil. Pada kenyataannya, setiap jenis usaha walau hanya skala kecil seharusnya membuat laporan keuangan karena memiliki manfaat yang sangat penting. Hal utama yang bisa diketahui adalah posisi keuangan bisnis dan unsur unsur laporan keuangan dalam keadaan baik atau buruk.

Hal penting lainnya adalah jenis-jenis laporan keuangan khususnya laporan arus kas bisa memudahkan untuk mendapatkan pendanaan atau mengajukan pinjaman ke bank. Jika diketahui bahwa perputaran uangnya tergolong kecil tidak perlu khawatir asalkan kondisi usaha dalam keadaan baik. Kegiatan bisnis kecil yang sehat akan lebih mudah untuk melakukan pinjaman uang dari bank sehingga kegiatan bisnis bisa lebih berkembang. Cara terbaik mengelola arus kas sebagai berikut.

1. Catat Semua Pemasukan dan Pengeluaran

Catatlah semua pemasukan dan pengeluaran bisnis yang sedang dijalani. Walau bukan seseorang yang mendalami akuntansi sehingga tidak paham cara mencatat arus kas yang benar, setidaknya catatan yang bisa dimengerti oleh diri sendiri itu penting. Catat pemasukan dan pengeluaran secara terpisah sesuai konsep dasar

akuntansi sehingga pada setiap akhir bulan bisa dihitung keuntungan atau kerugiannya. Jika bisnis sudah semakin berkembang dan bertambah besar maka laporan arus kas sudah harus dibuat dengan benar. Mungkin sudah saatnya untuk menyewa seorang akuntan agar pencatatan transaksi bisnis perusahaan menjadi lebih baik.

2. **Buatlah Rekening Bisnis di Bank**

Jika usaha atau bisnis telah mulai beroperasi, tidak usah menunggu hingga besar barulah membuat rekening bisnis di bank. Rekening bisnis dan rekening pribadi harus terpisah agar tidak terjadi kesalahan tentang keberadaan uang. Pembuatan rekening tabungan atau giro di bank tergolong mudah, cepat, dan murah. Kepemilikan rekening bisnis akan lebih mudah untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran bisnis dengan mudah melalui mutasi saldo atau rekening koran pada setiap bulan.

3. **Evaluasi Setiap Bulan**

Evaluasi pemasukan dan pengeluaran harus dilakukan setiap bulan. Perhatikan pundi pemasukan dan pengeluaran yang paling besar. Selain itu, evaluasi juga performa bisnis, produk, karyawan, dan evaluasi lainnya. Manajemen arus kas yang baik akan memudahkan para pebisnis untuk menentukan strategi pengembangan bisnis sesuai perkembangan akuntansi yang tepat. Arus kas yang kurang baik menyebabkan strategi bisnis tidak bisa ditentukan dan bisnis mungkin gagal atau bangkrut.

4. **Hitung Pengeluaran dengan Teliti**

Pengeluaran yang terlalu banyak atau boros bisa menyebabkan arus kas perusahaan menjadi tidak baik. Perhatikan dan pastikan daftar pengeluaran dan unsur sistem akuntansi yang bisa menunjang bisnis, bukan sekadar pengeluaran yang tidak penting. Mulailah berhemat dengan menghilangkan daftar pengeluaran yang tidak menunjang bisnis. Namun, tetap perhatikan agar minimalisasi pengeluaran tidak membuat bisnis menurun.

5. Bayaran Gaji Pekerja Tepat Waktu

Para pekerja telah merelakan waktu dan tenaganya untuk bekerja sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan lancar maka gaji (perbedaan gaji dan upah dalam akuntansi) harus dibayarkan tepat waktu setiap bulannya. Hak yang harus mereka terima tidak boleh ditunda karena bisa memengaruhi arus kas perusahaan. Jika tanggal pembayaran gaji jatuh pada hari libur maka pembayaran harus dilakukan sehari sebelumnya.

6. Rajin Mengumpulkan Piutang dan Perketat Persyaratan Kredit

Setiap usaha biasanya memiliki jenis jenis piutang kepada pihak lain atau rekanan sehingga jadwal penagihan harus dibuat. Hindari pihak atau pelanggan yang sering lewat jatuh tempo saat membayar. Jika memang diperlukan karena sudah terlalu sering, berilah denda kepada pihak yang telat membayar. Hal ini juga sudah diterapkan oleh perusahaan besar seperti bank. Lakukan penelitian pada contoh piutang perusahaan terlebih dahulu kepada calon pelanggan untuk menghindari risiko kredit macet karena piutang yang tidak terbayarkan atau terlalu lama tertunda bisa mengacaukan arus kas perusahaan.

Beberapa cara tersebut cukup efektif untuk dilakukan agar bisnis berkembang. Buatlah laporan arus kas perusahaan dengan benar sehingga keadaan bisnis bisa lebih diketahui secepatnya. Laporan keuangan perusahaan yang baik akan memudahkan pebisnis dan pihak terkait untuk mengambil keputusan penting.

3. -Memaksimumkan Kekayaan Pemilik Perusahaan

Salah satu tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan pemilik perusahaan atau pemegang sahamnya (wealth of the shareholders). Sebab, prinsip ekonomi menyatakan bahwa penggunaan dana hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat yang lebih besar dari pengorbanannya. Berikut penjelasan lebih lanjutnya. Tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan laba perusahaan. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditur, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas dari pada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tidak mengabaikan kewajiban sosial, seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk.

-Memaksimumkan Nilai Perusahaan

Memaksimalkan nilai perusahaan (market value of firm) memperhatikan dua unsur yang penting, yaitu nilai waktu uang dan risiko yang ditanggung oleh pemilik perusahaan. Nilai waktu uang berarti kita mengakui bahwa nilai rupiah saat ini selalu lebih berharga dari pada nanti. Investor mempertimbangkan risiko yang ditanggungnya. Semakin tinggi risiko yang ditanggung, semakin besar tingkat keuntungan yang disyaratkan. Memaksimalkan nilai perusahaan identik dengan memaksimalkan laba dalam pengertian ekonomi (economic profit). Setiap penggunaan dana harus dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih besar dari biaya. Pertimbangan teknis memaksimumkan nilai perusahaan adalah sebagai berikut:

Memaksimumkan nilai bermakna lebih luas dari pada memaksimumkan laba, karena memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan perusahaan. Mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang mungkin beragam.

Latar Belakang

Dari berbagai sumber yang saya baca komisaris PT KA, Hekinus Manao, menolak menyetujui laporan keuangan PT KA tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Terdapat dugaan bahwa terjadi manipulasi laporan keuangan, yang seharusnya mengalami kerugian sebesar Rp63 miliar, tetapi malah dicatat untung sebesar Rp6,9 miliar. Menurut Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Ahmadi Hadiboroto, pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan akuntan publik tersebut dan komisaris PT KA, Hekinus Manao. Dari klarifikasi tersebut terdapat tiga perbedaan.

Pertama, kewajiban PT KA untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) Rp 95,2 miliar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Manajemen PT KA tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak itu karena upaya penagihan masih berlangsung. Sebaliknya, Hekinus berpendapat, pencadangan kerugian harus dilakukan karena kecilnya kemungkinan tertagihnya pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KA pada 1998-2003.

Kedua, penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KA sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun.

Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 miliar. Namun, Hekinus berpendapat saldo penurunan nilai sebesar Rp 6 miliar tersebut harus dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

Ketiga, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif Rp674,5 miliar dan penyertaan modal negara Rp70 miliar oleh manajemen PT KA disajikan dalam neraca 31 Desember 2005 sebagai bagian dari utang. Akan tetapi, kata Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.

Permasalahan

Menurut pendapat saya, pada kasus PT. KAI ini terdapat beberapa pihak yang dapat dianggap melakukan pelanggaran etika profesi, yaitu pihak manajemen, BPK, akuntan manajerial, auditor internal, dan auditor. Tetapi pada kenyataannya yang lebih banyak dibahas adalah auditor yang dianggap memberikan pernyataan bahwa laporan keuangan perusahaan ini adalah wajar.

Tetapi, jika diperhatikan tidak semua tuduhan yang ditujukan pada auditor tersebut adalah benar. Karena terdapat berbagai metode yang memang sah atau boleh dilakukan menurut SAK, seperti pencatatan penurunan nilai perlengkapan (penyusutan atau amortisasi). Boleh saja melakukan pembebanan dengan metode garis lurus ataupun menurun berganda dan juga menentukan pembebanan yang dilakukan secara langsung atau bertahap selama beberapa tahun asalkan wajar. Misalnya dalam permasalahan ini, akuntan manajerial perusahaan berhak untuk menyusutkan perlengkapannya secara bertahap dalam waktu 5 tahun.

Dari prinsip akuntansi yaitu konservatif dan hati-hati, perusahaan boleh mengakui bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif Rp674,5 miliar dan penyertaan modal negara Rp70 miliar oleh manajemen sebagai utang. Karena akuntan hanya dapat mengakui kas sebagai milik perusahaan jika telah benar-benar diterima dan ada bukti-buktinya.

Mengenai kedua hal ini, mungkin saja terjadi kesalahpahaman antara pihak manajemen, akuntan manajerial perusahaan dan komisaris PT KA, Hekinus Manao. Dilihat dari latar belakang Hekinus Manao yang merupakan penyandang Master of Accountancy lulusan Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio pada tahun 1990 mungkin terdapat perbedaan dalam cara pencatatan ataupun metode-metode akuntansinya.

Akan tetapi, mengenai kewajiban PT KA untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) Rp95,2 miliar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu sepertinya terdapat kesalahan. Karena piutang seharusnya didapat dari kegiatan operasi perusahaan bukan dari beban pajak yang ditagih kepada pelanggan.

Selain itu, dengan jumlah yang sangat besar (material) dan jangka waktu yang cukup lama (1998–2003), PT. KAI seharusnya melakukan pencadangan piutang atas kemungkinan tidak tertagihnya beban pajak tersebut.

Hal ini akan sangat memengaruhi laporan keuangan perusahaan dan laporan kinerja yang menjadi penilaian investor. Tentu saja dari kesalahan pencatatan ini, juga akan sangat merugikan pihak-pihak lain seperti karyawan, kreditor, *supplier*, dan pihak lainnya. Mulai dari

bagaimana perusahaan akan membayarkan kewajibannya kepada karyawannya, membayar utang-utang, dan membayar tagihan pesanan.

Telaah Kritis

Dari permasalahan-permasalahan di atas terdapat beberapa hal yang dilanggar. Yang pertama dari segi profesionalisme. Pada standar profesional akuntan khususnya terdapat berbagai hal seperti objektivitas dan independensi. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan manajerial dan diaudit oleh akuntan publik harus objektif yaitu memberikan laporan yang sebenarnya, baik angka-angka maupun catatan atas laporan keuangannya dilaporkan secara *disclosure*. Dan juga independensi akuntan seharusnya diutamakan, akuntan harus bertindak dengan seimbang, tidak boleh berpihak pada manajemen, investor, ataupun pemerintah. Asersi-asersi yang dinyatakan pada catatan atas laporan keuangan harus mencantumkan bukti-bukti, *disclosure*, *existence* dan *valuation*.

Sebelum memberikan pernyataan wajar pada laporan keuangan, seorang auditor seharusnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu sehingga dapat membuktikan bahwa data-data yang ada pada laporan keuangan tersebut benar. Auditor menelusuri kembali data-data keuangan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan. Apalagi dengan jumlah yang material dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

Kedua, dari segi moralitas. Bagi akuntan manajerial perusahaan mungkin saja mengalami berbagai tekanan seperti ancaman pecat, penurunan jabatan, dan sebagainya sehingga menyulitkan ia dalam mengambil keputusan dan membuat laporan keuangan yang objektif. Selain itu, juga mungkin terdapat *opportunity* bagi akuntan manajerial seperti *contingent fee* yang mungkin juga tawarannya dapat diterima oleh seorang auditor PT.

KAI. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kode etik akuntan terjadi termasuk manipulasi laporan keuangan.

Saran

Dari sumber yang saya baca terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004 sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI

sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

Nama : Fajri

NIM : 192510021

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA

Kelas Reguler A Magister Manajemen

UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti

kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting.

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud.

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

1. Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

2. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

3. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

4. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

5. Kompetensi dan kehati-hatian professional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

6. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

7. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf

kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi

perusahaan dari kerugian.

7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama: Herlina

NIM: 192510026

Kelas : Reguler B Malam

PERTANYAAN: Berikan analisis anda atas kasus di atas melalui:

1. Latar belakang kasus

- Latar belakang kasus PT. Kereta Api ini adalah Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

2. Permasalahan kasus

- Permasalahan PT. Kereta Api ini adanya manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya

3. Saran dan rekomendasi

- Saran untuk PT. Kereta Api adalah
 1. Membuat Laporan Keuangan yang se rill mungkin atau sesuai fakta dan penyusunannya sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan yang berlaku
 2. Seharusnya PT. Kereta Api melakukan penagihan pajak kepada pihak ketiga tersebut dengan memberikan sanksi atau peringatan agar mereka segera melunasi hutang pajaknya dengan melihat lagi kontrak kerja yang sudah disepakati bersama dan bila mereka tidak mentaati perjanjian tersebut kita bisa menuntut balik mereka.
 3. Seharusnya PT. Kereta Api mengaku menderita kerugian yang memang terjadi jangan ditutupi.
- Rekomendasi untuk PT. Kereta Api
 1. Manager Keuangan harus membuat Laporan Keuangan sesuai SAK yang berlaku, dan untuk piutang tidak tertagih itu tidak bisa dikatakan pendapatan karena masih belum tertagih.
 2. ada 2 (dua) buah metode yang biasanya dipergunakan untuk menghitung penghapusan atas “*bad debts*” yakni ***charge-off*** / ***direct write-off*** (**PENGHAPUSAN LANGSUNG**) dan ***reserve method*** (**BERTAHAP MELALUI CARA DICADANGKAN**) . Dalam ***charge-off method***, jumlah yang tidak bisa ditagih itu diakui dalam nilai yang sama juga sebagai biaya

(PIUTANG TAK TERTAGIH = BIAYA), atau dalam bahasa lain ketika piutang sudah tidak tertagih lagi, maka hal tersebut direalisasikan dengan mengurangi saldo piutang dan memunculkan biaya piutang tak tertagih. Jika ternyata, nilai utang yang awalnya tidak bisa ditagih itu akhirnya dapat dibayarkan di kemudian hari oleh pihak ketiga, maka hal tersebut diperlakukan sebagai “**Penghasilan Lain-Lain**”.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.
 - Berbicara mengenai manajemen keuangan perusahaan, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan dan bagaimana manajer keuangan suatu perusahaan melalui keputusan-keputusan yang diambil dapat mencapai tujuan perusahaan.
Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Di samping itu, masalah keuangan perusahaan, baik lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
 - Arus kas, apabila dikelola dengan baik, dapat membantu bisnis Anda selalu terorganisasi. Mengingat fungsinya yang dapat menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada suatu periode akuntansi, maka melalui arus kas Anda bisa memantau kondisi keuangan bisnis secara rutin. anda bisa mengetahui dengan pasti sumber pemasukan dan untuk apa saja uang tersebut digunakan.
Apabila Anda baru saja mulai mendirikan bisnis, buatlah daftar pengeluaran yang umumnya hanya dilakukan dalam sekali. Pengeluaran ini bisa mencakup item yang sudah Anda bayar atau hendak akan dibayar, seperti pembelian properti, konstruksi, furnitur, dan sebagainya. Lalu, susun pengeluaran bulanan bisnis. Anda dituntut

untuk fokus agar tak ada pengeluaran yang terlewat. Pengeluaran bulanan ini bisa mencakup website hosting, cicilan bulanan, gaji karyawan, dan sebagainya.

Dalam menyusun arus kas bisnis, Anda diminta untuk jujur dan bersikap seobyektif mungkin. Apabila hasil akhirnya ternyata ada lebih banyak pengeluaran dari pemasukan, Anda bisa segera melakukan pemotongan anggaran agar kondisi keuangan bisnis tetap aman.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

- Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan adalah target yang bersifat kuantitatif dan pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja perusahaan.

Tujuan perusahaan sangat penting sehingga perumusan misi dan visi perusahaan harus dilakukan dengan serius. Misi dan visi perusahaan harus dirumuskan sependek mungkin dengan spesifikasi yang jelas sehingga setiap orang akan selalu mengingatnya.

Tujuan perusahaan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas, dalam merumuskannya tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik.

Jawaban soal UTS Manajemen Keuangan:

1. LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. PERMASALAHAN KASUS

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai :

1. Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

2. Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

* Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

* Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.

* Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

* Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

* Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Jadi saya berasumsi berdasarkan dari sumber yang saya baca, terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004, sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah

menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran.

Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing.

Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit.

Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

2. Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

a. Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

b. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

c. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

3. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu:

Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh

manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

1. Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

2. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan

contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3. Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangn dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

NAMA : IRHAMNAH

NIM : 192510048

Kelas Reguler A Magister Manajemen

Soal Studi Kasus :

Manipulasi Laporan Keuangan PT.KAI

Pertanyaan: Berikan analisis anda atas kasus diatas melalui :

1. Latar belakang kasus
2. Permasalahan kasus
3. Saran dan rekomendasi

Jawaban :

1. Latar Belakang Kasus

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan

kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyedihkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas

segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. Permasalahan kasus

Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasikan terjadinya manipulasi.

3. Saran dan rekomendasi

- 1) Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- 2) Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik.
- 3) Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
- 4) Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- 5) Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
- 6) Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
- 7) Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

8) Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan atautkah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.

9) Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal

10) Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan.

11) Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

Soal Teori :

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan, dan apa manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non keuangan?

Jawaban :

Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya. Di samping itu, masalah keuangan perusahaan, baik lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan. Dalam mempelajari manajemen keuangan diperlukan pengetahuan akuntansi. Namun demikian manajemen keuangan dan akuntansi mempunyai perbedaan yang mendasar. Pada akuntansi yang dipelajari adalah proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan, yang hasil akhirnya adalah suatu laporan keuangan dalam bentuk:

- (1) neraca (*balance sheet*),
- (2) laporan laba/rugi (*income statement*), serta
- (3) laporan arus kas (*statement of cash flows*).

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan, dan neraca dapat dianalogikan sebagai sebuah foto yang diambil pada suatu saat karena hanya

menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Laporan laba/rugi menggambarkan besarnya penjualan, biaya dan laba yang terjadi selama satu periode akuntansi, misalkan satu tahun. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan penggunaan arus kas selama periode akuntansi.

Manajemen keuangan dan akuntansi memfokuskan perhatian pada aktiva dan pasiva perusahaan, keduanya berbeda dalam hal periode waktu. Akuntansi, dengan penekanan pada aspek tinjauan (*review*), pada umumnya memiliki wawasan historis (apa yang telah terjadi). Salah satu tujuan utamanya adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi di masa lalu. Akuntan membuat neraca untuk menentukan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, atau melakukan audit terhadap laporan keuangan untuk menguji akurasinya.

Manajemen keuangan dengan penekanan pada pembuatan keputusan lebih memfokuskan pada masa depan (*future*). Tugas manajemen keuangan adalah memanfaatkan pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Manajemen Keuangan mengkonsentrasikan diri pada pernyataan sebagai berikut: "*what do we do now?*" and "*where do we go from here?*"

Apa tanggung jawab manajer keuangan?

Manajer keuangan memiliki sejumlah bidang keputusan, yang dijadikan kunci dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan yang bersifat strategis bagi perusahaan, diantaranya meliputi: (1) Pemilihan produk dan pasar perusahaan, (2) Strategi yang digunakan untuk penelitian, investasi, produksi dan pemasaran, (3) Pemilihan, pelatihan, pengorganisasian, serta memotivasi eksekutif dan karyawan lainnya, (4) Memperoleh dana dengan berbagai biaya yang efisien, dan (5) Melakukan penyesuaian terhadap keputusan-keputusan tersebut dengan perubahan lingkungan.

Pada dasarnya seorang manajer, atau manajer keuangan sering terlibat dan berinteraksi langsung dengan keputusan-keputusan tersebut.

Lalu apa tugas pokok manajer keuangan?

Tugas pokok manajer keuangan yang perlu kita tahu pada dasarnya yaitu: (1) Menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, (2) Menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, (3) Menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, (4) Mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan (5) Menganalisis laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan.

Manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non keuangan :

1. Keuangan perusahaan terkontrol dengan baik

Segala pengeluaran dan pemasukan bakal tercatat dengan baik apabila fungsi manajemennya berjalan dengan benar. Hal ini tentu dapat digunakan untuk menentukan batasan-batasan pengeluaran tanpa membebani uang kas perusahaan.

2. Memaksimalkan pemanfaatan dana perusahaan

Manajer keuangan tentu juga memiliki aktivitas memantau mana kira-kira pengeluaran yang bermanfaat dan yang tidak. Apabila perusahaan memiliki manajemen yang baik, maka mereka akan memaksimalkan aset perusahaan untuk hal-hal yang bermanfaat saja.

3. Struktur modal sehat

Manfaat lainnya adalah bisa menciptakan struktur permodalan yang sehat. Modal yang sehat seperti apa? Modal yang sehat adalah yang lebih besar bersumber dari keuntungan daripada utangnya.

Artinya rasio modal dari keuntungan lebih besar daripada utang.

4. Investasi aman

Perusahaan bisa mendapatkan uang dengan menginvestasikan uang yang mereka punya. Bisa melalui perluasan bisnis, atau menginvestasikan uangnya ke pasar modal. Dengan manajemen keuangan dan analisa keuangan yang baik, dana-dana tersebut bakal diinvestasikan dengan aman dan pastinya menguntungkan.

5. Mampu memberikan kepastian untuk para pemegang saham

Salah satu manfaat bila perusahaan memiliki manajerial keuangan yang baik adalah mereka mampu memberikan kepastian laba, kepastian harga pasar, dan kepastian laporan keuangan yang sehat untuk para pemegang sahamnya.

Dengan jaminan itu, pemegang saham juga tidak akan ragu untuk meningkatkan besaran investasinya. Artinya, perusahaan akan mendapatkan suntikan permodalan yang lebih besar lagi.

Soal Teori :

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Jawaban :

Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis tentunya memiliki kas. Kas perlu dikelola dengan baik untuk operasional perusahaan di masa sekarang maupun untuk investasi keperluan yang mendatang. Pengelolaan kas kecil perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Diantaranya adalah mengelola kas kecil metode imprest dan fluktuatif. Selain dikelola, kas perusahaan juga perlu dibuatkan cialis sicuro. laporan arus kas nya. Kesemuanya merupakan aktifitas perusahaan yang tergabung di dalam manajemen kas perusahaan. Berikut akan diuraikan mengenai pengertian kas perusahaan secara lebih rinci.

Dalam ilmu manajemen finansial, ada perbedaan antara mendapatkan keuntungan dan memiliki keuangan dalam kas yang cukup. Laba adalah angka yang muncul di akun Anda pada akhir tahun. Sedangkan kas adalah uang yang Anda miliki di bank. Uang kas ini menentukan apakah Anda bisa membayar beban usaha termasuk gaji, tagihan maupun membayar *supplier*.

Beberapa perusahaan yang memiliki laba yang bagus, bisa terpaksa menghentikan operasional bisnis mereka karena kehabisan uang kas. Bagaimana pun tanpa uang kas di bank, manajemen tidak akan bisa membayar semua kewajiban usaha dan bisa dipastikan apabila operasional berhenti maka kinerja perusahaan akan terganggu dan mengalami penurunan.

Masalah-masalah manajemen finansial yang berkaitan dengan arus kas terjadi karena arus kas keluar lebih cepat atau lebih banyak dibanding uang masuk. Hal seperti ini biasa terjadi karena berbagai hal. Salah satunya kemungkinan terjadi karena perusahaan terlambat dalam melakukan penagihan kepada pelanggan sehingga mengalami penundaan antara waktu untuk membayar bahan-bahan, biaya produksi maupun membayar tagihan *supplier*.

Soal Teori :

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Jawaban :

- a. **Tujuan didirikannya** suatu **perusahaan** adalah untuk memperoleh laba, meningkatkan penjualan, memaksimalkan nilai saham, dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham
- b. **Didirikannya** sebuah **perusahaan** memiliki **tujuan** yang jelas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa **tujuan perusahaan** adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya.
- c. Tujuan perusahaan adalah kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Pengertian Perusahaan Menurut Para Ahli dan Undang-undang

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia. Tujuan perusahaan adalah memperoleh keuntungan (laba).

2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, miliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3. Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan pasal 1 angka 1
Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1997 adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 pasal 1 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian perusahaan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 pasal 1 Tentang BUMN adalah perusahaan umum yang selanjutnya disebut dengan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tujuan perusahaan :

1. Perusahaan harus melakukan usahanya dalam aktivitas yang spesifik yang bermanfaat secara ekonomis dan sosial. Manfaat ekonomis berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan baik oleh perusahaan dan konsumen. Manfaat sosial berkaitan dengan pandangan konsumen bahwa tujuan perusahaan adalah "baik" dalam perspektif konsumen. Contoh : Tujuan perusahaan adalah menjadi penyedia jasa hiburan judi terbesar di negara X. Secara ekonomis dengan adanya usaha di tempat tertentu, maka sektor pendukung yang lain akan ikut berkembang.
2. Perusahaan harus mengembangkan organisasi untuk terus melanjutkan usahanya dan mengimplementasikan strategi-strateginya. Contoh : Tujuan

perusahaan adalah menjadi penyedia jasa catering terbesar di Jakarta. Dengan adanya tujuan tersebut, perusahaan dapat membuat berbagai macam produk makanan dan jasa layanan yang mendukung tujuan perusahaan. Ini juga berarti seluruh ide untuk produk dan jasa yang tidak mendukung tujuan perusahaan dapat dihilangkan.

3. Perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang cukup untuk bertahan hidup. Contoh : Tujuan jangka pendek perusahaan adalah bertahan hidup, jangka menengah 10%, jangka panjang 5%. Besarnya angka sasaran bervariasi dan tergantung pada kebijakan dan kondisi perusahaan masing-masing.

NAMA : IRHAMNAH
NIM : 192510048
MATKUL : MANAJEMEN KEUANGAN
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya

mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting.

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud.

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab

karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-

hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)

- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang

bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Reguler A/34
Matkul: Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Ini cerita fakta sesuai keadaan kantor di mana tempat saya bekerja, dulu saya sempat di tempatkan bekerja bagian keuangan , dan saya sering mendengar kejadian yg tidak sesuai dengan apa yang mereka terima padahal mereka tanda tangan besar sedangkan mendapatkan uangnya kecil besar potongan dari pada pendapatan mereka sedangkan bagian bendahara kalau laporan sesuai apa yg kami tanda tangan padahal itu semua bohong atau curang, itu semua sering di lakukan bukan saja untuk PNS tetapi juga berlaku untuk pegawai Honorer apalagi yg honorer lebih gede lagi potongan nya. Kalau yang Honorer gak mau terima yang mereka kasih pasti tidak akan di ajak untuk perjalanan dinas lagi padahal yg rugi kan staf nya bukan bendaharanya seharusnya mereka kasih apa yang sudah di tanda tangani ini malah kasih gak sampe setengah dari yang di tanda tangani kan itu namanya kecurangan terbuka bukan lagi tertutup. Sok pasti di belakang kami mereka lebih curang lagi apa lagi sudah mendapatkan tanda tangan kami.

Permasalahan Kasus

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis untuk membahas permasalahan kasus : Pihak staf merasa dirugikan atas perbuatan si Bendahara kantor dan staf pembantunya, oleh karena itu kami sudah tau sifat dari kecurangan mereka jadi sewaktu2 mau mengambil uang perjalan dinas kami sepakat tidak mau di potong dan melaporkan masalah ini kepada sekretaris dinas

sehingga masalahnya dibicarakan baik2 setelah ada teguran dari sekretaris dinas tapi masih ada beberapa orang masih nakal kami sudah bisa mengatasinya sehingga kami tidak mau lagi di potong kalau mau di potong mereka sepakat untuk tidak pergi memeriksa lapangan sehingga pemborong dan dinas ada permasalahan pada keuangan dinas untuk pencairan dana ke lapangan padahal pemborong sudah mentransfer uang ke dinas atau bendahara pengeluaran sehingga Pegawai tidak bisa menjalankan perintah dari atasan seperti Mencatat apa yg mereka periksa, tidak ada laporan dari lapangan atau dokumentasi seperti foto image atau foto copy ktp dari kelompok tani yang menerima barang pegadaan dari kegiatan dari kantor kami. Setelah selesai ke lapangan mereka seharusnya memberikan laporan dokumentasi tersebut kepada saya karna saya sebagai operator komputer pada bidang perlengkapan saya ditugas kan untuk menerima berkas setelah mereka memeriksa barang seperti Berita Acara Serah Terima Barang dan Foto Image Pegawai Dinas atau pemborong yang telah memberikan bantuan tersebut dan yang terakhir foto kopi ktp karna itu sangat penting, setelah ,mereka memberikan berkas saya harus scanner foto tersebut dan mengupload ke simak Daerah atau Pusat karna sekarang kita system menyerahkan lewat aplikasi semua gak bisa di curangi apa lagi akhir tahun seperti ini saya di suruh bekerja ekstra untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan untuk mencapai 100% jadi kalau sudah 100 % saya bisa izin atau legah karna tidak ada lagi masalah sehingga orang pusat tidak memeriksa keadaan kami yang didaerah karena kalau mau di periksa satu per satu bisa gawat juga.

Saran dan Rekomendasi :

Saran saya untuk kasus di kantor saya sendiri, seharusnya tidak ada lagi yg namanya kecurangan terhadap keuangan kantor apa lagi pada pegawai di Dinas

tersebut sehingga tidak ada lagi masalah yang berlarut2 untuk di bahas atau di periksa setiap tahun nya cuman gara2 dana yang kebanyakan di potongnya atau Aset yang tidak tau arah mau dilakukan penghapusan APBD. Dan untuk tahun 2020 saya akan mempertegas untuk pekerjaan yang telah saya geluti selama 5 Tahun ini agar Pemeriksa barang yang kelapangan agar melengkapi berkas sehingga tidak ada masalah untuk pengiriman dokumentasinya seperti tahun 2019 ini kita masih kacau karena saya bekerja sendirian untuk dokumentasi tersebut padahal tugas nya banyak yang mengerjakan nya hanya 1 orang kan mustahil kalau bisa mencapai 100% untuk akhir desember nanti kalau gak ada yg membantunya apa lagi tugas saya pembantu asset APBD dan APBN. Rekomendasinya jika ada pekerjaan yang bisa membuat saya lebih baik saya akan mencari kantor tersebut dan saya akan resign dari kantor sekarang di tempat saat ini saya bekerja. Cuman itu saja yang dapat saya sampaikan karena itu semua kenyataan yg ada di dalam kantor kami.

Nama : Karmila Utari
NIM : 192510001
Kelas : Regule A/34

Latar Belakang Kasus :

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

- Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Permasalahan Kasus :

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar

laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai

- Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

- Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

- Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

- Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

- Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Saran dan Rekomendasi :

- Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.
- Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.
- Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.
- Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.
- Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi. Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

- Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran. Tujuan manajer non

keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing. Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit. Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

- Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

1. .Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

2. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

3. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

- Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: Perlunya kemampuan

perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Nama : Koko Harbinter
NIM : 192510025
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Koko Harbinter
NIM : 192510025
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UTS Manajemen Keuangan

Jawaban Studi Kasus:
MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN
PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

1. Latar belakang kasus

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN tudicatatmeraihkeuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan.

Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan di atas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

- ✓ Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
- ✓ Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

- ✓ Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- ✓ Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis:

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran dan rekomendasi untuk Manajemen PT KAI

Setelah melihat dan menganalisa dari permasalahan dan kasus di Manajemen PT KAI maka hal yang harus di lakukan untuk sebuah evaluasi dan perbaikan, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Sekaligus melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.
- Mengatur dan memenej kembali dalam perusahaan terkhusus dalam bidang laporan keuangan sehingga laporan selanjutnya tersaji dalam keadaan yang baik dan benar terhindar dari segala manipulasi dan data-data yang fiktif.
- Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

Daftar Pustaka :

- Agoes, Sukrisnodan I CendikArdana. EtikaBisnis dan ProfesiTantanganMembangunManusiaSeutuhnya. Jakarta: SalembaEmpat. 2009
- Leonard J. Brooks. Business & Professional Ethics for Accountans. South Western Collage Publishing. 2004
- Website <https://www.academia.edu/24848195>
- IAI, KodeEtikAkuntan Indonesia. 1998

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Menurut asumsi kami, bahwa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan adalah hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Seimbang akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : [Cash flow \(arus kas\)](#) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemilikinya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang di hasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin berperilaku secara etis dan baik, dan banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian masing-masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas-batas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

(Alhamdulillah)

NAMA : MARDESAH
NIM : 192510016
TUGAS : UAS MANAJEMEN KEUANGAN

DILEMA PROFESIONAL KEUANGAN

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan mark up harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen

melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting.

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud.

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. **Kepentingan Publik ;**

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. **Integritas ;**

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. **Objektifitas ;**

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. **Kompetensi dan kehati-hatian professional ;**

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan

internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)

- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.

6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

NAMA : MARDESAH
NIM : 192510016
TUGAS : UTS MANAJEMEN KEUANGAN

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

1. Latar belakang kasus

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan

Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan diatas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

- ✓ Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
- ✓ Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- ✓ Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- ✓ Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata

kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis :

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran dan rekomendasi untuk Manajemen PT KAI

Setelah melihat dan menganalisa dari permasalahan dan kasus di Manajemen PT KAI maka hal yang harus dilakukan untuk sebuah evaluasi dan perbaikan, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum

dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.

- Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Sekaligus melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.
- Mengatur dan memenej kembali dalam perusahaan terkhusus dalam bidang laporan keuangan sehingga laporan selanjutnya tersaji dalam keadaan yang baik dan benar terhindar dari segala manipulasi dan data-data yang fiktif.
- Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Jawab :

Seorang manajer perlu mempelajari manajemen keuangan karena sangat penting dan menentukan kelangsungan kelangsungan hidup dari perusahaan . Perusahaan akan mendapat keuntungan atau kebangkrutan dapat dipengaruhi bagaimana cara pengelolaan manajemen keuangan di perusahaan tersebut. Untuk menjalankan tugas sebagai manajer keuangan maka manajer keuangan perlu mengetahui fungsi fungsi manajemen keuangan itu sendiri .

Fungsi manajemen keuangan adalah :

1. *Perencanaan*

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kagiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

2. *Penganggaran*

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

3. *Pengelolaan*

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.

4. *Pencarian*

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.

5. *Pengendalian*

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

6. *Pemeriksaan*

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

Secara singkat Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund). Perkembangan manajemen keuangan sangat di pengaruhi oleh berbagai factor lain : factor kebijakan moneter, factor kebijakan pajak, factor kondisi ekonomi, factor kondisi sosial, dan factor kondisi politik. Dengan memahami fungsi manajemen keuangan maka Manajer keuangan pun perlu mempelajari manajemen keuangan adalah supaya manajer tersebut dapat mengetahui, membaca dan menganalisa laporan keuangan seperti Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan atau ditampilkan oleh anak buahnya di bagian keuangan. Dengan demikian manajer dapat mendeteksi apabila terjadi manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa

mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; Manajer keuangan bisa membaca laporan keuangan sehingga bisa mengetahui kondisi perusahaan apakah mengalami surplus atau defisit sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk perencanaan perusahaan selanjutnya. Manajer non keuangan bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Jawab :

Kas adalah uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. *Kas* merupakan bentuk aktiva paling liquid yang bisa dipergunakan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan, karena sifat liquidnya tersebut *kas* memberikan keuntungan yang paling rendah. Posisi keuangan perusahaan yang terus bergerak akan lebih mudah dilihat dan dipantau melalui laporan arus kas atau *cash flow* ini. *Cash flow* juga dapat dilihat dan diartikan dalam dua hal, untuk yang positif memberikan arti bahwa penghasilan kamu atau kita lebih besar dari pada pengeluaran. Sedangkan *cash flow* negatif berarti kebalikannya, yaitu pengeluaran kita lebih besar daripada penghasilan yang kita dapat. *Cash flow* Itu bisa dihitung sesuai periode tertentu, misal penghasilan dalam setahun dan pengeluaran selama setahun, ataupun yang lainnya. Apabila aliran kas perusahaan mengarah kepada nilai yang positif, maka perusahaan mendapat laba. Sedangkan jika menunjukkan angka yang negatif, maka perusahaan mengalami defisit.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Jawab :

Ketika perusahaan ini dimiliki oleh beberapa individu yang mana merupakan pemegang saham maka tujuan perusahaan juga bertambah. Tujuan perusahaan tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja dan keuntungan perusahaan semata namun juga meningkatkan kekayaan pemegang sahamnya. Pemegang saham merupakan seseorang atau badan hukum yang memiliki saham suatu perusahaan. semakin banyak saham yang dimilikinya maka

semakin besar pula pengaruhnya dalam perusahaan. ia memiliki hak-hak istimewa dalam perusahaan yang bahkan bisa mempengaruhi secara langsung. Harga saham tiap perusahaan berbeda satu dengan lainnya. Semakin baik performa kinerja perusahaan dan reputasinya maka semakin tinggi pula harga saham perusahaan tersebut. Pembelian saham juga ada jumlah minimal yakni sebesar 1 lot atau 500 lembar saham. Tujuan utama meningkatkan kekayaan pemegang saham tidak lain adalah untuk memakmurkan mereka. Tujuan lainnya ialah bisa anda simak sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai modal yang telah disetor oleh investor sehingga nilai dari perusahaan ini juga ikut naik
2. Dengan meningkatkan kekayaan pemegang saham anda juga bisa mengetahui sejauh mana investasi ini dapat memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang diisyaratkan investor
3. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham atas kinerja perusahaan sehingga modal yang disetorkan tidak akan terbuang sia-sia. Hal ini juga akan meningkatkan reputasi saham perusahaan dimata public nantinya.
4. Dengan meningkatkan kekayaan perusahaan tak hanya memakmurkan investor saja namun juga anda turut mensejahterakan pegawai, pemasok dan kreditur.

Untuk mengukur kinerja perusahaan ini demi meningkatkan kekayaan pemegang saham terdapat tiga metode yang biasa digunakan. Metode tersebut diantaranya adalah balance scorecard, economic value added dan analisis profitabilitas dari lini segmen. Pemegang saham sendiri juga terbagi atas pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Seperti namanya pemegang saham mayoritas memiliki saham yang lebih besar dibandingkan pemilik saham lainnya.

Cara Meningkatkan Kekayaan Pemegang Saham

Peran pemegang saham bagi perusahaan sangatlah besar. Untuk itu penting bagi anda meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Adapun cara yang bisa anda lakukan untuk meningkatkan pemegang saham diantaranya adalah sebagai berikut :

- **Meningkatkan Pendapatan**

Cara yang paling pertama yang bisa anda lakukan ialah meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya pendapatan perusahaan maka laba yang dihasilkan juga ikut naik. Bertambahnya laba maka dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham ini juga ikut meningkat. Untuk menaikkan pendapatan perusahaan anda bisa menempuh beberapa langkah seperti menetapkan target penjualan yang lebih besar, meningkatkan pelayanan dan mutu produk, lebih focus untuk menjaring lebih banyak konsumen baru serta memperluas lini usaha.

- **Meningkatkan Harga Saham**

Kenaikan harga saham juga bisa memperkaya pemegang saham. Dengan harga saham yang tinggi maka terdapat keuntungan yang lebih saat pemegang saham tersebut memperdagangkan saham yang dimilikinya. Selisih antara harga beli saham yang dulu pernah dikeluarkan oleh investor dengan harga jualnya sekarang akan menjadi keuntungan baginya. Untuk meningkatkan harga saham anda perlu memperhatikan factor-factor yang mempengaruhi harga saham itu sendiri seperti dibawah ini :

Dividend dan EPS

Peningkatan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham akan mempengaruhi harga dari saham suatu perusahaan. Peningkatan dividen ini juga termasuk salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham atas kinerja perusahaan selama ini. Laba per saham atau EPS yang tinggi pula dapat meningkatkan permintaan atas saham tersebut. Kenaikan permintaan saham ini akan berdampak pada harga saham perusahaan tersebut. Harga saham juga tak hanya dipengaruhi factor internal perusahaan saja namun juga dari factor eksternal seperti kebijakan pemerintah hingga naik turunnya suku bunga.

Aksi Korporasi

Aksi korporasi juga mempengaruhi harga saham perusahaan. Pasalnya kebijakan yang diambil perusahaan akan menyebabkan perubahan dalam perusahaan. Ada beberapa

contoh aksi perusahaan seperti akuisisi, merger ataupun right issues. Penurunan harga saham Hal ini tak hanya berdampak pada harga saham saja namun juga pada pegawai anda.

Fluktuasi Kurs

Harga saham juga bisa dipengaruhi oleh nilai kurs rupiah. Terlebih bagi perusahaan yang menggunakan mata uang asing dalam aktivitas bisnisnya tentu akan terasa dampaknya ketika harga kurs naik turun. Melemahnya nilai rupiah akan membebani perusahaan yang memiliki beban utang atas kegiatan importnya. Dampaknya perusahaan akan menanggung lebih banyak beban yang mengurangi laba yang dihasilkan sehingga laba yang dibagikan juga kian kecil.

Tingkat Bunga

Tingkat bunga juga mempengaruhi harga saham melalui laba perusahaan. Suku bunga yang tinggi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian juga harga bahan baku yang digunakan. Selain itu tingkat bunga juga memiliki pengaruh yang besar pada pasar modal antara saham dan obligasi. Apabila suku bunga naik maka saham akan dijual sehingga harga saham menjadi turun dan para investor akan lebih mengejar obligasi.

- **Perputaran Laba Bersih**

Untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham anda juga perlu memperhatikan perputaran laba bersih. Untuk meningkatkan dividen yang dihasilkan maka penting untuk menahan sebagian laba yang dihasilkan untuk ekspansi perusahaan. Sebagian laba lagi bisa dibagikan dalam bentuk dividend an sebagiannya akan menjadi laba ditahan. Apabila laba ditahan ini terus dikumpulkan maka akan mampu meningkatkan ekuitas. Modal yang didapatkan dari laba ditahan ini bisa anda pakai untuk investasi dan memperbesar skala perusahaan anda saat ini.

Nama : Maya Trimadona
NIM : 192510012
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Kasus UAS

Seandainya andalah yang bekerja di perusahaan tersebut di bagian keuangan, tindakan apa yang menurut anda harus di lakukan dalam menghadapi dilema seperti kasus ini.

Jawab :

Seandainya saya bekerja di perusahaan tersebut dibagian keuangan. Tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi, dilema :

Memberikan penjelasan dan saran kepada atasan dengan bahasa yang sopan bahwa agar perusahaan lebih sukses dengan memperbaiki manajemen keuangan sesuai dengan standar kode etik yang berlaku.

PERTANYAAN: Berikan analisis anda atas kasus di atas melalui:

1. Latar belakang kasus
2. Permasalahan kasus
3. Saran dan rekomendasi

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan

kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan

e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. **Keentingan Publik ;**

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. **Integritas ;**

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. **Objektifitas ;**

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. **Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;**

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan

pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Maya Trimadona
NIM : 192510012
Kelas Reguler A Magister Manajemen

Kasus UTS

PERTANYAAN: Berikan analisis anda atas kasus di atas melalui:

1. Latar belakang kasus
2. Permasalahan kasus
3. Saran dan rekomendasi

1. Latar Belakang Kasus

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

2. Permasalahan Kasus

Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidak mampuan KAP dalam mengindikasikan terjadinya manipulasi.

• Profitable

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari “laba semu” tersebut.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

• Legal

1. PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:
 - Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
 - Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
 - Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

• Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

- 1) Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah.
- 2) Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

• Right

- 1) Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- 2) Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

• Sustainable Development

- 1) Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus).
- 2) Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

- Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

- Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut.

3) Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

4) Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT. KAI.

5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.

6) Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.\

7) Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT

Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

4. Sikap Yang Diambil :

- Manajemen PT KAI
 - a) Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
 - b) Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang.
- KAP S. Manan & Rekan & Rekan
 - a) Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesioireksi
 - b) Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat
 - c) Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

5. Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

- Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik.

- Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
- Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
- Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
- Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
- Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
- Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
- Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan”

dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

- Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

3. Saran dan Rekomendasi :

1. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
2. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas, moral dan etika yang baik.
3. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
4. Perusahaan harus mengimplementasikan Good Corporate Governance oleh manajemen yang dirancang dalam rangka menekan kemungkinan terjadinya fraud.
5. Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
6. Retrospective Examination yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
7. Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud.
8. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka.
9. Akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan “proses bisnis” perusahaan.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini

JAWABAN :

1. Manajer perlu mempelajari manajemen keuangan karena hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa

memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Seimbangny akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : Cash flow (arus kas) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.
3. Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang dihasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin

berperilaku secara etis dan baik, dan banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing- masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

Nama : Minarti

NIM : 192510014

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA

Kelas Reguler A

UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Pengelolaan manajemen perusahaan yang kurang baik. Terdapat transaksi keuangan yang tidak layak yaitu: markup harga, pencatatan tanpa bukti dan lain-lain. Laporan keuangan dibuat ganda dengan tujuan untuk menghindari atau memperkecil pajak. Hal ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Bagaimana cara untuk menghadapi perusahaan dengan pengelolaan manajemen yang kurang baik ?

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi

perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.

- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

- a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting.

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud.

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. Tanggung jawab profesi ;

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal

perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi seandainya staff keuangan diperusahaan itu yang akan saya lakukan:

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. **Akan segera mengundurkan diri** dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat dan lebih nyaman

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.

2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan”

dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Minarti

NIM : 192510014

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA

Kelas Reguler A

UTS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihnya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Kerugian terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

Di satu sisi, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada

tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

Latar Belakang Kasus :

Adanya kecurangan pada PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2

Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

PERMASALAHAN KASUS

Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasikan terjadinya manipulasi.

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari “laba semu” tersebut.

- b. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Legal

- (1). PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:
 - a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek
- (2) **KAP S. Manan**& Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

- a. Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah.
- b. Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

Right

- a. Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus).

II .Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi di perusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti

para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan

- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

- a. Competency

Akuntan manajemen tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

- b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

- c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan

publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. **Kepentingan Publik ;**

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut.

c. **Integritas ;**

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. **Objektivitas ;**

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah

memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT. KAI.

e.Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Namun, dalam laporan keuangan itu,

pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Seharusnya berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen PT KAI

- a. Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- b. Meminta maaf kepada *stakeholders* melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang.

2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan

- a. Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi mereka
- b. Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat
- c. Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Saran dan Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
8. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
9. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
10. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan

adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

11. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling berkaitan satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya.

Manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non Keuangan?

- Mengurangi pengeluaran (biaya) dalam proses bisnis
- Mengatur arus kas
- Menghitung pajak
- Memaksimalkan proses bisnis dengan tujuan mencapai laba maksimal

- Sebagai alat pengambil keputusan (decision maker) dalam menentukan kebijakan perusahaan ke depan. Misal jika manajer operasional membutuhkan dana maka perlu untuk melihat ketersediaan dana perusahaan dan berkomunikasi dengan manajer keuangan, begitu juga dengan manajer pemasaran jika membutuhkan dana untuk promosi kegiatan marketing perusahaan. Sehingga apabila terjadi kesalahan maka akan cepat terdeteksi dan segera dapat dicari solusinya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan !

Posisi kas yang baik dan mencukupi harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan menjadi tidak terjamin pada bisnis yang mengalami kehabisan kas. Ketika hal tersebut terjadi, perusahaan tidak mampu membayarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan berikutnya. Tidak mempunyai kasi yang cukup tidak baik bagi perusahaan dalam berbisnis, namun sebaliknya menyimpan kas terlalu banyak juga sama kurang baiknya. Kas yang tidak berputar dalam sebuah proses kegiatan berbisnis tidak dapat memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan (menjadi *idle money*). Dan dapat berdampak investor juga ragu untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Meskipun upaya memaksimalkan laba merupakan tujuan yang logis bagi setiap perusahaan, tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba, melainkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*stock holder's wealth*) atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*).

Kekayaan pemegang saham adalah perkalian antara harga saham per lembar dan jumlah saham yang beredar. Ini berarti bahwa kekayaan pemegang saham akan tercermin dari nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh harga saham perusahaan bersangkutan di bursa saham. Dengan demikian, maksimisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan (harga

saham) memiliki arti yang benar-benar sama. Perumusan maksimisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai tujuan pada akhirnya akan memudahkan pengukuran kinerja suatu perusahaan.

Menurut Koch & McDonald, pengukuran kinerja suatu perusahaan yang bertujuan memakmurkan para pemegang saham dapat digunakan tiga metode alternatif :

- Analisis profitabilitas dari segmen/lini dari perusahaan, merupakan merupakan indikator yang sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauhmana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor.
- *Economic Value Added*, merupakan tujuan korporat untuk meningkatkan nilai (value) dari modal (capital) yang investor dan pemegang saham telah tanamkan dalam operasi usaha dan merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan biaya modal (cost of capital), disamping itu pula EVA juga dapat digunakan sebagai indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi.
- *Balance ScoreCard*. Dalam suatu bisnis yang bertujuan memaksimumkan kekayaan para pemiliknya, ditunjukkan dengan dinamika dan hubungan dari tiga keputusan manajemen dasar, yaitu keputusan investasi, keputusan operasi dan keputusan pendanaan.

Selain itu, manajer keuangan di perusahaan membuat keputusan untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham membeli saham perusahaan untuk memperoleh keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Oleh karena itu tujuan perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan pemegang saham dengan cara memaksimumkan harga saham perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik sisa (*residual owner*) di perusahaan. Mereka akan memperoleh sesuatu dari perusahaan dalam urutan akhir setelah pegawai, pemasok, dan kreditur sehingga apabila kekayaan pemegang saham meningkat berarti kekayaan pihak lainnya dalam perusahaan juga meningkat.

Ada dua alasan yang mudah dipahami mengapa tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan, bukan maksimalisasi laba:

- ***Laba tidak menunjukkan arus kas.*** Laba yang disajikan pada laporan laba-rugi bukanlah besaran yang menunjukkan arus kas, sehingga jika laba suatu perusahaan Rp 5 miliar, hal itu sama sekali tidak menyatakan bahwa terdapat arus kas sebesar jumlah yang sama. Dalam manajemen keuangan, pengambilan keputusannya justru didasarkan atas arus kas (cashflow). Artinya, keputusan keuangan dinilai benar manakala keputusan itu meningkatkan arus kas bersih yang diterima perusahaan pada masa mendatang.
- ***Laba tidak mempertimbangkan waktu dan risiko*** . Andaikata proyek A dan B akan menghasilkan laba pada dua tahun mendatang: Laba A Rp5 miliar pada tahun pertama dan Rp5 miliar pada tahun kedua, sedangkan laba B Rp0 rupiah pada tahun pertama dan Rp 10 miliar pada tahun kedua, rata-rata laba per tahun kedua proyek jelas sama, yakni Rp 5 miliar. Proyek mana yang layak dipilih? Berdasarkan pendekatan maksimisasi laba, kita akan bersikap indifferen terhadap kedua proyek.

Nama : Muhammad Febri
NIM : 192510020
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama: Muhammad Febri

Nik: 192510020

Study: Manajemen keuangan

Status: Ujian UTS.

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola

yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Analisis :

- Profitable

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.

2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

- Legal

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

1. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun
2. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

KAP S. Manan & Rekan melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

- Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

- 1) Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT. KAI menjadi tidak akurat.

2) Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

- Right

1) Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi tidak akurat.

2) Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

- Sustainable Development

1) Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus).

Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen PT KAI

a). Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.

b). Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang.

2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan

a). Melakukan jasa profesional sesuai SPAP.

b). Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat

c). Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulangi kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Saran

- 1). Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- 2). Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
- 3). Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik.
- 4). Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- 6). Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas mengisi posisi jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis.
- 7). Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui.

Kesimpulan:

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

Daftar Pustaka :

Agoes, Sukrisno dan I Cendik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat. 2009

Leonard J. Brooks. Business & Professional Ethics for Accountants. South Western Collage Publishing. 2004

IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia. 1998

Soal teori.

1. Mengapa para manager perlu mempelajari manajemen keuangan dan apa manfaat mempelajari keuangan bagi manager non keuangan?
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan?
3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini?

Jawaban:

1. Karena tugas pokok manajer keuangan yang perlu kita tahu pada dasarnya yaitu: (1) Menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, (2) Menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, (3) Menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, (4) Mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan

dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan (5) Menganalisis laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan. Manfaat memahami laporan keuangan adalah :

1. Perusahaan dapat menyusun program perencanaan yang efektif sesuai dengan kondisi perusahaan.
2. Dapat meyakinkan investor/mendapatkan pinjaman modal ataupun pertanggung jawaban terhadap investor.
3. Dapat melakukan penghitungan pajak
4. Dapat mengambil keputusan/kebijakan perusahaan
5. mempermudah pengembangan bisnis di masa akan datang.
6. Dapat mengetahui terjadinya Korupsi bila terjadi kejanggalan dalam laporan keuangan.

2. Posisi kas yang baik untuk perusahaan yaitu memiliki jumlah uang kas yang secukupnya untuk anggaran perusahaan dan sebagian uang kas di investasikan di beberapa bidang lain sehingga dapat menambah income perusahaan sehingga perputaran arus kas berjalan dengan baik untuk tujuan tambahan modal perusahaan dan pengembangan berbagai bisnis di masa akan datang.

3. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham adalah dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang akan memberikan tingkat pengembalian yang di atas biaya risiko yang disesuaikan dengan modal. Manajemen membutuhkan dua hal: memiliki kredibilitas sehingga ketika investasi tersebut disampaikan kepada para pemegang saham dan calon investor, harga saham akan meningkat. Kedua, memiliki disiplin untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan investasi ini, potensi mereka dapat terealisasi.

Nama : Muhammad Firdiansyah
NIM : 192510009
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Jawaban Studi Kasus:

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

1. Latar belakang kasus

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan

Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan diatas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

- ✓ Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk

membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- ✓ Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- ✓ Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- ✓ Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis :

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran dan rekomendasi untuk Manajemen PT KAI

Setelah melihat dan menganalisa dari permasalahan dan kasus di Manajemen PT KAI maka hal yang harus di lakukan untuk sebuah evaluasi dan perbaikan, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Sekaligus melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

- Mengatur dan memenej kembali dalam perusahaan terkhusus dalam bidang laporan keuangan sehingga laporan selanjutnya tersaji dalam keadaan yang baik dan benar terhindar dari segala manipulasi dan data-data yang fiktif.
- Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

Daftar Pustaka :

- Agoes, Sukrisno dan I Cendik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Leonard J. Brooks. Business & Professional Ethics for Accountans. South Western Collage Publishing. 2004
- Website <https://www.academia.edu/24848195>
- IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia. 1998

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Menurut asumsi kami, bahwa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan adalah hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa

menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Seimbang akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : Cash flow (arus kas) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang dihasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi

lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin berperilaku secara etis dan baik, dan banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing- masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

(Alhamdulillah)

Nama : Ria Lita Fatimah

NIM : 192510017

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Dosen Dr.H.Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

Kelas Reguler 34 A Magister Manajemen

UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus

Dilema Seorang Profesional Keuangan

A. Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

B. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II. Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya

mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. Creative Accounting

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. Fraud

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain:

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. **Kepentingan Publik ;**

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. **Integritas ;**

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. **Objektifitas ;**

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. **Kompetensi dan kehati-hatian professional ;**

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan

pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

C. Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan atautkah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal.
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan.
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

Nama : Ria Lita Fatimah
NIM : 192510017
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA
Kelas Reguler 34 A Magister Manajemen
UTS Manajemen Keuangan

1. LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak

pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT.KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. PERMASALAHAN KASUS

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai :

- ✚ Masalah piutang PPN. Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.
- ✚ Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan. Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.
- ✚ Masalah persediaan dalam perjalanan. Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

- ✚ Masalah uang muka gaji. Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.
- ✚ Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

- ✚ Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.
- ✚ Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.
- ✚ Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.
- ✚ Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

- ✚ Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Jadi saya berasumsi berdasarkan dari sumber yang saya baca, terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004, sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki

kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Menurut asumsi kami, bahwa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan adalah hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang

manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan ?

Seimbangnya akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : Cash flow (arus kas) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini ?

Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang dihasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin berperilaku secara etis dan baik, dan banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen

untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing-masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

Nama : Rifqy Adli Fadillah
NIM : 192510039
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Kelas : Reguler A
Dosen : Dr. H. Bakti Setyadi, S.E., M.M., M.Ak, C.A.

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Berdasarkan soal yg diberikan, latar belakang permasalahan mengenai studi kasus sebagai profesional di bidang keuangan adalah memposisikan saya untuk mengambil tindakan dalam menghadapi dilema kasus tersebut serta memberikan saran dan rekomendasi. Tentu saya akan memposisikan apabila saya menjadi posisi di bagian keuangan pada top level management, dengan mempertimbangkan kemampuan serta wewenang saya dalam memberikan saran dan rekomendasi secara mutlak agar pemberian saran dan rekomendasi yg saya utarakan dapat masuk akal apabila saya berada pada jabatan yang bersangkutan.

Perusahaan yang saya pimpin merupakan perusahaan dagang yang disebutkan memiliki budaya fraud dan melanggar norma etika, seperti pencatatan tanpa bukti, markup harga, transaksi yang tidak semestinya, membuat laporan keuangan ganda dan melanggar kepatuhan pajak serta melanggar aturan SAK hingga lain sebagainya. Namun, perusahaan diatas tidak disebutkan memiliki permasalahan keuangan seperti permasalahan cashflow atau fresh money ataupun permasalahan budaya nepotisme. Juga tidak disebutkan bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan IPO, adapun apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan IPO, saya rasa pemegang mayoritas saham tersebut mutlak dikuasai oleh pihak kecil dan bukan dikuasai oleh komponen banyak pihak dengan mempertimbangkan nalar hingga dapat terjadi budaya fraud yang massive hingga seperti yang dijelaskan. Sehingga hal tersebutlah yang melandasi saya dalam memberikan saran dan rekomendasi.

Permasalahan Kasus :

Berdasarkan latar belakang kasus diatas, maka dapat diambil beberapa inti permasalahan kasus yaitu tindakan kecurangan dan tentu akan otomatis mengarah kepada norma etika antara lain:

- a. Melakukan pencatatan keuangan tidak layak secara umum, berpeluang melanggar aturan SAK dan melanggar norma etika profesi akuntan.
- b. Melakukan pencatatan tanpa bukti, peluang terbesar untuk terjadinya kecurangan untuk memperkaya kepentingan segelintir pihak dan peluang untuk terjadinya pelanggaran etika.
- c. Melakukan mark-up harga, akan berpotensi untuk melanggar etika profesi yang berkaitan dengan pengadaan oleh pihak ketiga.
- d. Mencatat transaksi ke perkiraan yang tidak semestinya, berpotensi untuk menyalahgunakan dan melanggar ketentuan rekayasa laporan keuangan yang tidak diperbolehkan demi untuk kepentingan tertentu atau dikondisikan demi kepentingan tertentu.
- e. Membuat laporan keuangan ganda, sehingga negara akan dirugikan karena nominal pajak menjadi tidak semestinya.

Saran dan Rekomendasi :

Atas dasar latar belakang yang saya kemukakan diawal, tentu apabila saya menjadi low level management ataupun menjadi mid level management, saya akan memutuskan untuk mundur dari perusahaan tersebut atas dasar menimbang sesuatu hal yg bertabrakan dengan hati nurani saya. Keputusan untuk mundur tersebut juga menimbang situasi saya sebagai staf bawah yang tidak dapat berbuat banyak karena atasan dan atau pemilik perusahaan yang menyuruh saya untuk ambil bagian dari praktik kecurangan tersebut. Sehingga setelah itu saya akan menjadi whistleblower kepada pihak yang berwenang dengan menimbang perusahaan tersebut telah menekan saya untuk terlibat dalam praktik kecurangan.

Namun saya juga memberikan saran dan rekomendasi dengan situasi apabila saya menjadi top level management dan dipercaya oleh pemilik perusahaan dalam satu visi misi untuk merubah semua keadaan yang terjadi berdasarkan permasalahan diatas, antara lain:

1. Merekrut team internal audit berkompeten yang saya percaya sendiri dari pihak non-existing, yang nantinya akan melaporkan langsung kepada saya dibawah struktur organisasi kesamping secara langsung.
2. Melakukan bersih – bersih dari seluruh staf yang terlibat dalam praktik kecurangan dan melanggar etika, bersamaan dengan paralel penyusunan perampingan struktur organisasi.
3. Menggunakan software keuangan yang advance dan yang berbasis cloud upload document, dan bukan hanya digunakan oleh bagian keuangan namun juga digunakan dan dapat terintegrasi baik kepada divisi lain seperti Human Resource, Procurement, Warehouse, Sales Marketing dan lain sebagainya.
4. Melakukan eksternal audit dari firma 4 besar selama maksimal dua tahun agar firma audit satu dan lainnya saling berkaitan atas firma sebelumnya dan tidak terjadi beban moral, setelah sebelumnya diadakan audit forensik atau audit investigasi apabila diperlukan.
5. Menggunakan jasa accounting service pihak ketiga untuk merapikan laporan keuangan sebelumnya dan membuat pondasi yg kuat untuk pembukuan selanjutnya.
6. Melakukan tax amnesty apabila jangka waktu tersebut masih dibuka oleh pemerintah. Dan menggunakan jasa konsultan pajak bila diperlukan untuk menyasati resiko bawaan pelanggaran pajak.
7. Menggunakan jasa apraisal publik, untuk menanggulangi ketidaksesuaian nilai aset atas budaya pelanggaran bawaan.
8. Menggunakan rekening bank terpusat oleh head office terutama untuk pemasukan dan atau hanya menggunakan rekening operasional untuk cabang dengan sistem otorisasi dari pusat. Dan membuat peraturan terpusat dari head office untuk pembayaran seluruh vendor ataupun pembayaran seluruh personal claim dan juga salary, baik secara sistem upload dan paralel hardcopy.
9. Membuat katalog pengadaan barang ataupun jasa dari pihak ketiga yang harus melalui pusat dengan perbandingan yang memumpuni sesuai standard yang masuk akal.
10. Menaikkan nilai otorisasi untuk pengeluaran atau pengadaan, apabila hanya dibutuhkan otorisasi oleh jabatan supervisor untuk nominal pengeluaran atau pengadaan tertentu, maka berikutnya diperlukan otorisasi oleh jabatan manager yang lebih tinggi, bahkan senior manager bila perlu.

11. Menurunkan target penjualan atau keuntungan apabila hal tersebut yang mendorong rekayasa laporan keuangan.
12. Menyesuaikan dan memperbaiki SOP yang baik dengan akreditasi ISO dari badan yang berkompeten dan ketat dalam kesudahan pelaksanaannya.
13. Melakukan proses recruitment oleh pihak ketiga secara penuh dan diadakannya top management review untuk seluruh calon staf baru.
14. Membuat peraturan rotasi berkala untuk staf dibagian strategis agar tidak ditemukannya celah fraud.
15. Membuat sarana wadah aspirasi dan wadah aduan whistleblowing dengan sistem anonim yang terhubung langsung dengan seluruh jajaran direksi dan internal audit.
16. Melakukan weekly meeting untuk middle management keatas untuk menilai kinerja dan progress, dan mengadakan monthly meeting atau circle gathering untuk seluruh staf dengan harapan dapat mempererat suasana kekeluargaan yang nyaman dan mendengarkan aspirasi seluruh staf.
17. Merubah lingkungan fisik kantor dengan konsep energi positif agar terdapat semangat baru, dan mengadakan jadwal rutin untuk olahraga dan refreshment agar seluruh staf merasa diperhatikan.
18. Melakukan revaluasi terhadap salary berdasarkan performa staf yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan setelah secara terbuka dijabarkan. Agar meminimalisir rasa ketidak-adilan terhadap nominal pendapatan staf dan mencegah keinginan fraud muncul kembali
19. Melakukan siraman rohani dan mengutamakan kebebasan ibadah untuk seluruh staf, dikarenakan iman merupakan benteng utama dan benteng terakhir untuk mencegah fraud dan pelanggaran etika.

Nama : Rifqy Adli Fadillah
NIM : 192510039
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Kelas : Reguler A
Dosen : Dr. H. Bakti Setyadi, S.E., M.M., M.Ak, C.A.

Soal Studi Manipulasi Keuangan PT KAI

Latar Belakang Kasus :

Laporan keuangan merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada masyarakat pada umumnya dan pemegang saham dan calon pemegang pada khususnya. Laporan keuangan memberikan informasi yang menggambarkan performa perusahaan dan dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu, seharusnya laporan keuangan dapat mencerminkan keaslian informasi tersebut, yaitu informasi yang seharusnya dapat dipercaya. Namun pada prakteknya banyak laporan keuangan yang seringkali disajikan tidak dalam bentuk sebenarnya oleh pihak perusahaan karena kepentingan tertentu

Pada perusahaan PT KAI terjadi kecurangan terhadap transparansi kejujuran dalam pengelolaan manajemen yang diduga dalam bentuk manipulasi data laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan tersebut tercatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar yang padahal seharusnya perusahaan tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Permasalahan Kasus :

Berdasarkan latar belakang kasus diatas, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan kasus antara lain:

1. Perusahaan tersebut tercatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar yang padahal seharusnya perusahaan tersebut menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar.
2. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga.
3. Terjadi kekeliruan pencatatan karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih.
4. Diduga manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akumulasi permasalahan terjadi di tahun 2005

Saran dan Rekomendasi :

Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan permasalahan kasus yang dijabarkan, maka dapat diberikan beberapa saran dan rekomendasi antara lain:

1. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.
2. Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure
3. Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan
4. Membentuk auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan
5. Pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan
6. Menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan

Soal Teori

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.

Jawab:

Manajemen cashflow yang baik merupakan salah satu inti dari sebab keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Seperti salah satu contoh, bagaimana perusahaan dapat memiliki performa yang baik apabila manajemen cashflow-nya tidak dapat dapat memperhitungkan dengan matang antara waktu tanggal penerimaan pendapatan dengan nominal yang cukup untuk membayar gaji pegawai tepat pada waktunya atau bahkan meleset. Serta contoh lain apabila perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha yang bersiklus project/batch based dimana diperlukan modal terlebih dahulu diwaktu awal progres atau produksi dan baru akan mendapatkan pemasukan setelah project/batch tersebut telah selesai atau terjual. Maka skill manajer yang handal dalam kemampuan manajemen keuangan sangat diperlukan, dikarenakan siklus usaha yang dicontohkan diatas sangat krusial untuk estimasi keuangan dari mulai budgeting yg tepat agar tidak mengganggu budget project/batch lain, pencairan dana untuk biaya modal yang berhubungan dengan forecasting umur penerimaan atau penjualan dan serta hubungannya yang berkaitan dengan durasi progres atau produksi agar berjalan tanpa hambatan dana, serta perencanaan pembayaran barang dan jasa pihak ketiga dan estimasi penerimaan penjualan agar tepat sesuai termin yg telah rencanakan diawal dan justru tidak meleset yang berpotensi akan mengganggu manajemen cashflow dan berpotensi menambah biaya tambahan, dengan harapan tidak mengganggu target profit yang telah ditetapkan.

Contoh kasus diatas merupakan contoh sederhana mengapa pentingnya seorang manajer untuk mempelajari manajemen keuangan, ditambah untuk manajer non keuangan justru akan menjadi sangat banyak nilai positif untuk performa team dan bagi keberlangsungan hidup perusahaan apabila memiliki mindset peduli akan contoh kasus diatas. Apalagi, tujuan utama berdirinya perusahaan adalah mencari laba yang tidak lepas kaitannya dari ilmu manajemen keuangan, dan segala sesuatu tentang perusahaan dinilai dengan jumlah nominalnya. Contohnya secara kasat mata lambang/nama baik perusahaan tidak memiliki nilai secara nominal, namun justru di dalam laporan keuangan terdapat akun goodwill yg dinilai berdasarkan nominalnya. Juga

umur ekonomis penggunaan suatu barang atau alat juga dinilai jangka waktu penggunaannya dengan nilai nominal dengan bentuk akun depresiasi.

Karena alasan diatas, manfaatnya manajer non keuangan apalagi manajer keuangan untuk mempelajari manajemen keuangan adalah agar di setiap lini perusahaan memiliki mindset profit oriented. Sebagai contoh, apabila manajer HR diberi budget untuk merekrut staf dengan gaji 10 juta, maka dia akan mencari staf yang akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan berkali – kali lipat dari gaji yang dibayarkan perusahaan. Contoh lain, apabila seorang manajer produksi memiliki mindset profit oriented, maka dia akan berusaha memajemen nilai efektifitas dari jumlah anggota dan biaya lembur yg kaitannya dengan jumlah cost, atau juga ikut memperhatikan overhead mesin dan gedung dalam proses produksinya. Maka dari itu, apabila seluruh komponen anggota dalam perusahaan terutama jajaran manajer keatas memiliki mindset profit oriented, maka saya rasa perusahaan tersebut merupakan seibarat Dream Team.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Jawab:

Posisi kas atau setara kas yang baik bagi perusahaan adalah posisi dimana kas atau setara kas pada perusahaan tersebut berada diposisi sedang, tentu tolak ukur sedang itu berbeda - beda tergantung dari setiap jenis usaha yang dijalankan perusahaan tersebut dan keadaannya. Namun menurut pendapat saya secara umum, posisi kas yang baik itu harus dapat disesuaikan dengan kemampuan untuk membayar jumlah pengeluaran gaji dalam waktu dekat, mampu dapat membayar segala bentuk utang dalam jangka pendek, mampu untuk membiayai modal usaha dalam waktu dekat dan mampu untuk membiayai operasional bulanan perusahaan. Tentunya posisi kas rendah maka akan mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan untuk menghadapi kewajiban tersebut, serta posisi kas yang tinggi atau berlebih maka akan menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk mempergunakan atau memutar uangnya untuk manfaat dan keuntungan yang lebih baik.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Jawab:

Salah satu tujuan hidup manusia di dunia adalah mencari nafkah, tentunya tidak akan ada seorang pun yang mau jalur nafkahnya tersebut malah akan membuatnya merugi, dan hasrat manusiawi seorang manusia adalah menginginkan memiliki nafkah yg berlebih. Dalam hal ini, pemilik perusahaan mendirikan perusahaan adalah dengan tujuan untuk menjadikan perusahaan tersebut sebagai jalur nafkahnya, bahkan dengan tujuan mencapai level berlebih untuk memperkaya dirinya. Dan meningkatnya kekayaan identik dengan jumlah nominal pemasukan yg lebih besar dari nominal pengeluaran yang dalam pernyataan singkatnya adalah laba, dan dalam hal ini meraih laba dengan dicapai menggunakan jalur mendirikan perusahaan. Maka dari itu, tujuan utama perusahaan adalah mencari laba untuk memperkaya sang pemiliknya.

Nama : Rofik Satria

PEMBAHASAN UAS

NIM : 192510005

MANAJEMEN KEUANGAN

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Dr. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

1. Latar Belakang Kasus :

Tidak independensinya bagian keuangan dalam mengelolah asset, pelaporan keuangan baik untuk kepentingan internal dan eksternal serta tidak diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan yang seharusnya menjadi dasar yang valid untuk mencerminkan kondisi perusahaan.

2. Permasalahan Kasus :

- Pencatatan transaksi dan bukti yang tidak wajar, termasuk mark up , pencatatan tanpa bukti/kuitansi, serta pemasukan transaksi yang bukan di postnya.
- Pembuatan laporan ganda yang menyesatkan, karena sumber info yang digunakan tidak valid artinya LK tersebut fiktif-untuk tujuan memperkecil pembayaran pajak.
- Semua kegiatan bagian keuangan tidak lagi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tapi didasarkan atas perintah pemilik perusahaan yang bila tidak diikuti maka akan mendapatkan sanksi dari pemilik.

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan

contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3. Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataupun pelanggaran besar yang berbentuk kecurangn dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Rofik Satria

PEMBAHASAN UTS

NIM : 192510005

MANAJEMEN KEUANGAN

Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Dr. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

1. LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan

keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu

penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. PERMASALAHAN KASUS

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai :

1. Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

2. Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

* Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

* Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.

* Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

* Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

* Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Jadi saya berasumsi berdasarkan dari sumber yang saya baca, terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004, sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah

menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran.

Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing.

Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit.

Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

2. Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

a. Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

b. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

c. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

3. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu:

Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga

agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Nama : Sri Komalasari, SE
NIM : 192510018
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Latar Belakang Kasus :

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangandalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

- Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan. Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Permasalahan Kasus :

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai

- Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

- Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

- Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

- Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

- Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah utang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

Saran dan Rekomendasi :

- Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opinisepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.
- Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.
- Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ DewanKomisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada DewanKomisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetappada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.
- Managemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.
- Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakanbagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerjaperusahaan.Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinyadan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terhadidalam perusahaan.Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan.Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran.Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistemini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu

dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

- Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran. Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami oleh manajer saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing. Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit. Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.
- Terdapat tiga elemen penting arus kas yang dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:
 1. Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)
Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerimaan dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.
 2. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)
Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.
 3. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

- Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu: Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlu memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan

operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Nama : Sri Komalasari, SE
NIM : 192510018
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Ini cerita fakta sesuai keadaan kantor dimana tempat saya bekerja pada tahun 2017 terjadi kenjanggalan masalah keuangan, dulu saya sempat di tempatkan bekerja bagian keuangan , dan saya sering mendengar kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang mereka terima pada hal mereka tandatangan besar sedangkan mendapatkan uangnya kecil besar potongan dari pada pendapatan mereka sedangkan bagian bendahara kalau laporan sesuai apa yg kami tandatangan pada hal itu semua bohong, itu semua sering di lakukan bukan saja untuk PNS tetapi juga berlaku untuk pegawai Honorer apalagi yang honorer lebih besar lagi potongannya. Kalau yang Honorer tidak mau terima yang mereka kasih pasti tidaka kan di ajak untuk perjalanan dinas lagi padahal yang rugikan stafnya bukan bendaharanya seharusnya mereka kasih apa yang sudah di tandatangani ini malah kasih tidak sampai setengah dari yang di tandatangani.

Permasalahan Kasus

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis untuk membahas permasalahan kasus :Pihak staf merasa dirugikan atas perbuatan si Bendahara kantor dan staf pembantunya, oleh karena itu kami sudah tau sifat dari kecurangan mereka jadi sewaktu2 mau mengambil uang perjalan dinas kami sepakat tidak mau di potong dan melaporkan masalah ini kepada sekretaris dinas

sehingga masalahnya dibicarakan baik-baik setelah ada teguran dari sekretaris dinas tapi masih ada beberapa orang masih nakal kami sudah biasa mengatasinya sehingga kami tidak mau lagi di potong kalau mau di potong mereka sepakat untuk tidak pergi memeriksa ke lapangan sehingga pemborong dan dinas ada permasalahan pada keuangan dinas untuk pencairan dana ke lapangan padahal pemborong sudah mentransfer uang ke dinas atau bendahara pengeluaran ,sehingga Pegawai tidak bias menjalankan perintah dari atasan seperti Mencatat apa yang mereka periksa.

Saran dan Rekomendasi :

Saran saya untuk kasus di kantor saya sendiri, seharusnya tidak ada lagi yang namanya kecurangan terhadap keuangan kantor apa lagi pada pegawai di Dinas tersebut sehingga tidak ada lagi masalah yang berlarut-larut untuk di bahas. Mulai tahun 2018 sekarang sudah mulai system Transfer melalui rekening baik untuk Honor kegiatan ataupun honor lainnya. Dan alhamdulillah kasus tersebut sudah bias diatasi.

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

1. Latar Belakang Kasus :

Dinas Perhubungan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

2. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka

- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan

kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan

- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

- a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

- b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

- c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

- a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3.Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Vina Kristiana
NIM : 192510008
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Jawaban Studi Kasus:

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

1. Latar belakang kasus

PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan

Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan diatas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

- ✓ Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk

membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp. 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- ✓ Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- ✓ Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- ✓ Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejangalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis :

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran dan rekomendasi untuk Manajemen PT KAI

Setelah melihat dan menganalisa dari permasalahan dan kasus di Manajemen PT KAI maka hal yang harus di lakukan untuk sebuah evaluasi dan perbaikan, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- Meminta maaf kepada stakeholders melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang. Sekaligus melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

- Mengatur dan memenej kembali dalam perusahaan terkhusus dalam bidang laporan keuangan sehingga laporan selanjutnya tersaji dalam keadaan yang baik dan benar terhindar dari segala manipulasi dan data-data yang fiktif.
- Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

Daftar Pustaka :

- Agoes, Sukrisno dan I Cendik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat. 2009
- Leonard J. Brooks. Business & Professional Ethics for Accountans. South Western Collage Publishing. 2004
- Website <https://www.academia.edu/24848195>
- IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia. 1998

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Menurut asumsi kami, bahwa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan adalah hal mendasar agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan. Sehingga dia bisa terjebak dalam kerugian. Juga agar manajer bisa membaca arus kas yang seimbang dalam perusahaan yang dikelolanya sehingga sehat dan tidaknya perusahaan itu dia bisa mengetahuinya. Jika sehat bisa terus dikembangkan jika sebaliknya bisa menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Di sisi lain juga bahwa para manajer itu merupakan kunci dalam pengaturan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan. Maju dan tidaknya tergantung pada manajernya. Adapun untuk hal pelaporan dan pembacaan pelaporan keuangan, si manajer harus bisa mengerti dan memahami akan hal itu. Karena hal keuangan bisa dikatakan juga sebagai ruh atau nyawanya dari sebuah perusahaan. Jika seorang manajer tidak bisa membaca keuangan maka dia telah kehilangan bagaimana mengelola ruh perusahaan itu.

Seorang manajer yang non keuangan jika dia belajar tentang keuangan maka keuntungan dan manfaatnya adalah; dia bisa dengan mudah untuk mengetahui kondisi keuangan dalam perusahaan, bisa memberikan informasi bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya dalam rangka putusan investasi, pemberian kredit, dan keputusan lainnya. Juga dia bisa memberikan laporan kondisi dan potensi keuangan, juga bisa memberikan informasi akan kebutuhan pihak yang berkepentingan. Di sisi lainnya yang lebih jauh dia mampu untuk mengetahui tugas pokok seorang manajer keuangan bawahannya dalam menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, bisa

menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, bisa menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, bisa mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan bisa menganalisis dan membaca laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan tersebut yang dikelolanya.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Seimbang akan arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) dari sebuah perusahaan itu menjadi acuan dasar baiknya sebuah perusahaan. Secara luasnya bahwa : Cash flow (arus kas) merupakan sumber kehidupan dari sebuah bisnis. Apabila pemasukan bisnis dari sebuah perusahaan lebih banyak daripada pengeluaran, maka bisnis perusahaan itu memiliki arus kas yang positif. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis perusahaan lebih banyak daripada pemasukan, maka bisnis perusahaan memiliki arus kas yang negatif. Karenanya, penting bagi sebuah perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang dikelolanya.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Benar, bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Contoh di sebuah PT. Maka para Direktur, komisaris, manajer dan lain-lain harus bekerja dengan baik demi memaksimalkan perolehan laba yang dihasilkannya dan bisa diambil manfaatnya oleh para pemilik pemegang saham. Namun sebenarnya disisi

lain, para pengurus perusahaan memang berupaya mengoptimalkan nilai pemegang saham, mungkin menjadi tujuan utama, ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak organisasi/perusahaan. Banyak para pengurus / manajer yang ingin berperilaku secara etis dan baik, dan banyak dari mereka merasakan adanya kewajiban yang harus mereka emban kepada pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan lainnya, disamping kepada pemegang saham. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko sangat bervariasi, tergantung pada kepribadian atas masing- masing individu di jajaran manajemen. Akan tetapi selalu ada batas atas, sejumlah organisasi perusahaan secara terang-terangan menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan sedangkan profitabilitas menjadi tujuan kedua.

(Alhamdulillah)

NAMA : YOSE RIZAL

NIM : 192510022

KELAS : REGULER A

MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN

DOSEN : Dr.BAKTI SETYADI, SE,MM, Ak,CA

JAWABAN UAS

STUDI KASUS

DILEMA SEORANG PROFESIONAL KEUANGAN

DILEMA SEORANG PROFESIONAL KEUANGAN

1. Latar belakang kasus

Pada saat saya bekerja di bagian keuangan pada perusahaan yang dikelola dengan manajemen yang kurang baik, dimana sebenarnya bagian keuangan mengetahui praktek – praktek yang tidak sesuai dengan standar akutansi keuangan namun tidak dapat berbuat banyak akibat tekanan dari atasan atau perintah pemilik perusahaan.

Hal ini menyebabkan profesionalisme sebagai praktisi keuangan tidak berjalan dikarenakan adanya sanksi apabila tidak menjalankan perintah sehingga terjadilah perusahaan dikelola berdasarkan atas perintah atasan atau berdasar kemauan pemilik perusahaan.

Sebagai profesional keuangan saya menemukan proper akibat perintah atasan atau kemauan pemilik perusahaan seperti melakukan pencatatan tanpa bukti transaksi, Markup harga, pencatatan transaksi perkiraan tidak semestinya dan laporan keuangan ganda.

2. Permasalahan kasus

Praktek – praktek tidak sehat yang melanggar standar akutansi keuangan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

a. Melakukan pencatatan tanpa bukti transaksi

Dalam pencatatan keuangan, bukti transaksi dijadikan dokumen yang memvalidasi bahwa transaksi yang anda lakukan benar terjadi. Mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi menghindarkan bisnis dari mencatat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi alias transaksi fiktif.

Dalam bukti transaksi terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut seperti total harga, kuantitas barang/jasa, nama vendor/konsumen, tanggal terjadinya transaksi, dengan kata lain mengandalkan bukti transaksi dapat meminimalisir keteledoran dalam mencatat keuangan bisnis, apalagi jika hanya

mengandalkan ingatan atau rekaan belaka. Pencatatan keuangan tanpa disertai bukti transaksi tidak boleh dilakukan

b. Markup Harga

Markup merupakan peningkatan harga atau jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari suatu produk untuk menghasilkan harga jual yang menyebabkan margin menjadi naik dengan tujuan untuk menutup biaya tidak langsung dan laba rugi perusahaan.

Tetapi jika harga ditentukan terlalu tinggi akan berakibat kurang menguntungkan. Dalam hal ini pembeli akan berkurang, volume penjualan berkurang, semua biaya mungkin tidak dapat ditutup dan akhirnya perusahaan akan menderita kerugian.

c. Pencatatan transaksi perkiraan yang tidak semestinya

Transaksi keuangan atau bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara langsung dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasional perusahaan tersebut yang berpengaruh pada perubahan pada ketiga unsur yaitu asset/aktiva (harta), kewajiban (utang) dan ekuitas (modal).

Banyaknya pengaruh sebuah transaksi pada perubahan pencatatan akuntansi, maka berdampak pada berbagai macam laporan keuangan yang dihasilkan.

d. Laporan keuangan ganda untuk menghindari Pajak

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan sebuah perusahaan pada periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan didalam sebuah perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan.

Laporan keuangan yang baik harus memenuhi persyaratan-persyaratan, seperti Relevan, mudah dimengerti, netral, memiliki daya uji kevalidan, daya banding, tepat waktu dan lengkap.

Secara Analisis:

A. Profitable / Keuntungan :

Perusahaan yang membuat laporan keuangan ganda telah melakukan praktek kecurangan dengan kepentingan tertentu seperti untuk menghindari pajak dengan menyampaikan laporan keuangan jelek. Sebaliknya laporan keuangan yang bagus diberikan kepada perbankan untuk kepentingan memperoleh pembiayaan lebih cepat dan kepada otoritas pasar modal agar bisa go public.

B. Legal / Hukum :

Perusahaan melanggar Pasal 17 Ayat 1 bagian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

3. Sikap yang diambil

- a. Pemilik Perusahaan

Pemilik Perusahaan harus mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak manajemen untuk dikelola secara baik dan profesional dengan tanpa adanya tekanan-tekanan dan cukup dengan memberikan saran serta pengawasan dan koreksi terhadap kinerja manajemen.

b. Manajemen Perusahaan

Pencatatan keuangan tanpa disertai bukti transaksi, Pencatatan transaksi perkiraan yang tidak semestinya, Laporan keuangan ganda untuk menghindari Pajak tidak boleh dilakukan apabila praktik ini terkendala karena pihak lain diluar kuasa pihak manajemen maka sebaiknya mencoba untuk berkompromi dengan pihak tersebut dan berilah argumen-argumen yang logis agar pihak tersebut mau mengikuti sistem yang lebih baik.

c. Saya pribadi

Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan tentang kondisi ril dari perusahaan sekarang.

Merespon kebijakan yang diambil manajemen perusahaan, apabila mengarah kearah perbaikan pengelolaan perusahaan maka sebaiknya bertahan dan bersama-sama melakukan perbaikan pengelolaan perusahaan tersebut. Sebaliknya apabila kebijakan yang diambil manajemen perusahaan tetap sama saja mempertahankan pengelolaan perusahaan yang kurang baik maka sebaiknya keluar perusahaan tersebut.

4. Saran agar kasus serupa tidak terulang

Agar kasus serupa tidak terulang, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- 1) Membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal khususnya tentang otorisasi.
- 2) Mendahulukan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi/kelompok.

- 3) Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik. Serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
- 4) Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- 5) Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeleminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya Fraud. Corporate Governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan – kebijakan dan pendelegasian wewenang.
- 6) Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang menandai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
- 7) Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Exsternal diarahkan untuk mendeteksi Fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
- 8) Investigation and Remediation yang dilakukan Forensik Auditor. Peran Auditor Forensik adlah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan Fraud, tanpa memandang apakah Fraud itu hanya pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
- 9) Penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal.
- 10) Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai

kesempatan yang sama dan adil untuk ‘ Terpilih ‘. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “ berkenan “ dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan.

- 11) Akuntabilitas dan Transparansi setiap “ proses bisnis “ dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Kesimpulan

Untuk memajukan suatu perusahaan maka Pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan harus sepakat untuk bertindak profesional dan jujur dalam pengelolaan perusahaan.

NAMA : YOSE RIZAL

NIM : 192510022

KELAS : REGULER A

MATA KULIAH : MANAJEMEN KEUANGAN

DOSEN : Dr.BAKTI SETYADI, SE,MM, Ak,CA

JAWABAN UTS N TUGAS

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN

PT. KERETA API INDONESIA (PT.KAI)

1. Latar belakang kasus

PT. KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. PT. KERETA API INDONESIA (PT.KAI) terdeteksi melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan

Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh KAP S. Manan. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut.

2. Permasalahan kasus

Penolakan hasil audit dari perihal permasalahan diatas ternyata terdapat banyak hal kejanggalan-kejanggalan sebagaimana terangkum berikut ini, diantaranya adalah:

- ✓ Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp.

95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- ✓ Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp. 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp. 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- ✓ Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp. 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp. 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
- ✓ Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh KAP. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Secara Analisis:

A. Profitable / Keuntungan :

1. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M.
2. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

B. Legal / Hukum :

PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

- a) Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun;
- b) Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
- c) Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan

mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan: “Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Saran agar kasus serupa tidak terulang

Agar kasus serupa tidak terulang, maka perlu mengambil tindakan sebagai berikut :

- 1) Membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal khususnya tentang otorisasi.
- 2) Mendahulukan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi/kelompok.
- 3) Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik. Serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
- 4) Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- 5) Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeleminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya Fraud. Corporate Governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan – kebijakan dan pendelegasian wewenang.

- 6) Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang menandai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
- 7) Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Exsternal diarahkan untuk mendeteksi Fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
- 8) Investigation and Remediation yang dilakukan Forensik Auditor. Peran Auditor Forensik adlah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan Fraud, tanpa memandang apakah Fraud itu hanya pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
- 9) Penyusunan standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa, baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal.
- 10) Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk ‘ Terpilih “. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “ berkenan “ dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih orang lain. Disinilah peran propesionalisme dikedepankan.
- 11) Akuntabilitas dan Transparansi setiap “ proses bisnis “ dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Kesimpulan

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Perlunya mempelajari Manajemen Keuangan adalah agar para manajer dapat melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pendanaan modal, menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut serta untuk mengelola asset yang telah dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

Manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non keuangan adalah agar dapat melakukan Planning atau perencanaan keuangan yaitu meliputi perencanaan dari arus kas serta laba-rugi perusahaan. Melakukan Budgeting atau penganggaran, yaitu perencanaan atau penerimaan serta pengalokasikan anggaran biaya secara lebih efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Controlling atau pengendalian keuangan, hal ini merupakan tahapan untuk mengevaluasi serta perbaikan tentang keuangan serta sistem keuangan milik perusahaan. Proses Auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada

agar bisa sesuai dengan standar akuntansi serta tidak sampai terjadi penyimpangan didalamnya. Reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan berbagai informasi informasi tentang bagaimana kondisi keuangan milik perusahaan serta tentang analisa rasio dari laporan keuangan tersebut.

Dengan mengetahui dan memahami Planning atau perencanaan keuangan, Melakukan Budgeting atau penganggaran, Controlling atau pengendalian keuangan, Proses Auditing atau pemeriksaan keuangan dan Reporting atau pelaporan keuangan diharapkan manajer non keuangan dapat menjalankan perannya seperti manajer yang basicnya keuangan.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Cash Flow yang baik bagi perusahaan adalah yang positif dimana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, sebaliknya Cash Flow yang tidak baik bagi perusahaan adalah apabila pengeluaran lebih besar dari pendapatan.

Bila sebuah perusahaan memiliki arus kas yang positif maka mereka dapat menyelesaikan berbagai kewajiban mereka sehingga mereka dapat berinvestasi untuk perkembangan perusahaan.

Bila arus kas perusahaan negatif maka perusahaan harus mencari sumber pendapatan lainnya untuk menyelesaikan kewajiban mereka seperti pembayaran hutang,

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Benar bahwa tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah semestinya meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Pemilik perusahaan dalam membangun perusahaan dan bidang usaha yang akan dijalankan tujuan utamanya adalah mengejar profit atau laba yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai hal tersebut maka pemilik perusahaan biasanya

membentuk manajemen perusahaan yang berisi orang-orang ahli atau pilihan sesuai bidangnya untuk menjalankan perusahaan ataupun mengelola sendiri untuk membuat perusahaan tersebut terus eksistensi usahanya sehingga menghasilkan profit atau laba sebesar-besarnya. Pihak manajemen tersebut mulai dari tingkat paling rendah sampai teratas dituntut untuk dapat mengelola perusahaan dan mengatasi segala permasalahan yang ada sehingga perusahaan selalu bertumbuh sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemilik perusahaan.

Apabila manajemen berhasil mewujudkan target pemilik perusahaan maka akan mendapatkan hak mereka berupa gaji dan bonus sesuai yang dijanjikan/terbatas sedangkan pemilik perusahaan mendapatkan profit yang semaksimal mungkin.

Nama : YULIATI
NIM : 192510033
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak

2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatutnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak "berkenan" dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap "proses bisnis" dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Yulianti
NIM : 192510033
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UTS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

Transparansi serta kejujuran dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu badan usaha milik negara, yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihinya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, akumulasi permasalahan terjadi disini.

Latar Belakang Kasus :

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum

dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

PERMASALAHAN KASUS

Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI yang dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasikan terjadinya manipulasi.

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari "laba semu" tersebut.
- b. Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Legal

- (1). PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal "Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:
 - a. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
 - b. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan
 - c. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual Efek
- (2) **KAP S. Manan & Rekan** melanggar Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

- a. Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuangan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah.
- b. Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

Right

- a. Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus).

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang mau menanamkan modal ke perusahaan tersebut.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. Competency

Akuntan manajemen tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. **Kepentingan Publik ;**

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut.

c. **Integritas ;**

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. **Objektifitas ;**

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang berada di PT. KAI.

e. **Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;**

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun dalam laporan keuangan mengalami keuntungan.

f. **Perilaku profesional ;**

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam

melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Namun, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Seharusnya berdasarkan standar akuntansi keuangan tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen PT KAI

- a. Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.
- b. Meminta maaf kepada *stakeholders* melalui konferensi pers dan berjanji tidak mengulangi kembali di masa datang.

2) KAP S. Manan & Rekan & Rekan

- a. Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi mereka
- b. Melakukan koreksi atas opini yang telah dibuat
- c. Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

Saran dan Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
8. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
9. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
10. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk "terpilih". Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya tidak "berkenan" dengan orang

tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

11. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

SOAL TEORI:

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan?

Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling berkaitan satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya.

Manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non Keuangan?

- Mengurangi pengeluaran (biaya) dalam proses bisnis
 - Mengatur arus kas
 - Menghitung pajak
 - Memaksimalkan proses bisnis dengan tujuan mencapai laba maksimal
 - Sebagai alat pengambil keputusan (decision maker) dalam menentukan kebijakan perusahaan ke depan. Misal jika manajer operasional membutuhkan dana maka perlu untuk melihat ketersediaan dana perusahaan dan berkomunikasi dengan manajer keuangan, begitu juga dengan manajer pemasaran jika membutuhkan dana untuk promosi kegiatan marketing perusahaan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan !

Posisi kas yang mencukupi harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan menjadi tidak terjamin pada bisnis yang mengalami kehabisan kas. Ketika hal tersebut terjadi,

perusahaan tidak mampu membayarkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan berikutnya. Tidak mempunyai kas yang cukup tidak baik bagi perusahaan dalam berbisnis, namun sebaliknya menyimpan kas terlalu banyak juga sama kurang baiknya. Kas yang tidak berputar dalam sebuah proses kegiatan berbisnis tidak dapat memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan (menjadi *idle money*). Dan dapat berdampak investor juga ragu untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Meskipun upaya memaksimalkan laba merupakan tujuan yang logis bagi setiap perusahaan, tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba, melainkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*stock holder's wealth*) atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*).

Kekayaan pemegang saham adalah perkalian antara harga saham per lembar dan jumlah saham yang beredar. Ini berarti bahwa kekayaan pemegang saham akan tercermin dari nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh harga saham perusahaan bersangkutan di bursa saham. Dengan demikian, maksimisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan (harga saham) memiliki arti yang benar-benar sama. Perumusan maksimisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai tujuan pada akhirnya akan memudahkan pengukuran kinerja suatu perusahaan.

Menurut Koch & McDonald, pengukuran kinerja suatu perusahaan yang bertujuan memakmurkan para pemegang saham dapat digunakan tiga metode alternatif :

- Analisis profitabilitas dari segmen/lini dari perusahaan, merupakan merupakan indikator yang sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauhmana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberikan return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor.
- *Economic Value Added*, merupakan tujuan korporat untuk meningkatkan nilai (value) dari modal (capital) yang investor dan pemegang saham telah tanamkan dalam operasi usaha dan merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak dikurangi dengan biaya modal (cost of capital), disamping itu pula EVA juga dapat digunakan sebagai indikator tentang adanya penambahan nilai dari suatu investasi.

- *Balance Score Card*. Dalam suatu bisnis yang bertujuan memaksimalkan kekayaan para pemiliknya, ditunjukkan dengan dinamika dan hubungan dari tiga keputusan manajemen dasar, yaitu keputusan investasi, keputusan operasi dan keputusan pendanaan.

Selain itu, manajer keuangan di perusahaan membuat keputusan untuk kepentingan pemegang saham. Pemegang saham membeli saham perusahaan untuk memperoleh keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Oleh karena itu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan cara memaksimalkan harga saham perusahaan. Pemegang saham adalah pemilik sisa (*residual owner*) di perusahaan. Mereka akan memperoleh sesuatu dari perusahaan dalam urutan akhir setelah pegawai, pemasok, dan kreditur sehingga apabila kekayaan pemegang saham meningkat berarti kekayaan pihak lainnya dalam perusahaan juga meningkat.

Ada dua alasan yang mudah dipahami mengapa tujuan perusahaan dalam perspektif manajemen keuangan adalah maksimalisasi kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan, bukan maksimalisasi laba:

- ***Laba tidak menunjukkan arus kas***. Laba yang disajikan pada laporan laba-rugi bukanlah besaran yang menunjukkan arus kas, sehingga jika laba suatu perusahaan Rp 5 miliar, hal itu sama sekali tidak menyatakan bahwa terdapat arus kas sebesar jumlah yang sama. Dalam manajemen keuangan, pengambilan keputusannya justru didasarkan atas arus kas (cashflow). Artinya, keputusan keuangan dinilai benar manakala keputusan itu meningkatkan arus kas bersih yang diterima perusahaan pada masa mendatang.
- ***Laba tidak mempertimbangkan waktu dan risiko*** . Andai kata proyek A dan B akan menghasilkan laba pada dua tahun mendatang: Laba A Rp 5 miliar pada tahun pertama dan Rp5 miliar pada tahun kedua, sedangkan laba B Rp 0 rupiah pada tahun pertama dan Rp 10 miliar pada tahun kedua, rata-rata laba per tahun kedua proyek jelas sama, yakni Rp 5 miliar. Proyek mana yang layak dipilih? Berdasarkan pendekatan maksimisasi laba, kita akan bersikap indeferen terhadap kedua proyek.

Nama : Abu Naim Edwin
NIM : 192510011
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MM Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UAS Manajemen Keuangan

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

A. Latar Belakang Kasus :

Saya bekerja diperusahaan dimana perusahaan tersebut sekarang mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya baik itu utk menghindari pajak ataupun utk pihak lain agar mau bekerjasama, Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

B. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka dapat kita simpulkan serta membahas permasalahan kasus :

- I. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berbentuk perseroan terbuka

- Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.

- Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Akibat permasalahan tersebut maka ada yg diuntungkan dan ada yg dirugikan dan itu menurut saya sudah mekanggar, yang diuntungkan cuma perusahaan sedangkan yg dirugikan diantaranya :

1. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.

2. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laDari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.
- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan

kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan

- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

- a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepantasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

- b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

- c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

II. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

- a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan

dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

III. Sikap Yang harus Diambil :

1) Bagi Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Bagi saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.

4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal.

Terima kasih....

Nama : Abu Naim Edwin
NIM : 192510011
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen Dr.H.Bakti Setyadi SE, MMm Ak, CA
Kelas Reguler A Magister Manajemen
UTS Manajemen Keuangan

Jawaban soal UTS Manajemen Keuangan:

LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit

diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang

baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. PERMASALAHAN KASUS

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai :

1. Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

2. Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

* Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

* Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.

* Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

* Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

* Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Jadi saya berasumsi berdasarkan dari sumber yang saya baca, terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004, sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran.

Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing.

Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit.

Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

2. Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

- Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

- Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

- Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

3. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu:

Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien

mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Jawaban soal UTS Manajemen Keuangan:

1. LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. PERMASALAHAN KASUS

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai :

1. Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

2. Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

- * Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

- * Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.

- * Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

- * Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

- * Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Jadi saya berasumsi berdasarkan dari sumber yang saya baca, terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004, sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat

wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah

menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran.

Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing.

Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit.

Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

2. Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

a. Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

b. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva

perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

c. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

3. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu:

Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan

perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

UAS: Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

1. Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

2. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif

lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam

pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3. Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangn dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sanksi tanpa kompromi.

Nama : Aidil Fitriyah
NIM : 192510049
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen : Dr. H. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

SOAL STUDI KASUS

DILEMA SEORANG PROFESIONAL KEUANGAN

Latar Belakang Kasus

Perusahaan tempat saya bekerja dikelola dengan Manajemen yang kurang baik, terutama Laporan keuangan. Banyak hal - hal yang berkaitan dengan laporan keuangan tersebut tidak dilakukan secara layak (*Proper*). Ketidaksesuaian tersebut seperti melakukan catatan tanpa bukti, melakukan *mark up* harga, mencatat transaksi ke perkiraan yang tidak semestinya. Selain itu juga, membuat laporan keuangan ganda yang bertujuan untuk menghindari atau memperkecil besarnya pajak yang harus dibayar. Laporan ganda ini pun berlaku untuk semua data penjualan yang tersimpan di komputer kantor, sehingga pemilik perusahaan akan kelabakan pada saat Petugas Pajak melakukan *verifikasi* (pengecekan). Ketidaksesuaian ini melanggar Standar Akuntansi Keuangan dan juga dapat dikategorikan perbuatan kriminal. Ini menjadikan Pekerja dibagian keuangan tidak dapat berbuat banyak dikarenakan perintah dari pemilik perusahaan, padahal disisi lain sangat bertentangan dengan *Profesionalisme* sebagai praktisi keuangan.

Permasalahan Kasus

Untuk melihat secara lebih terhadap permasalahan kasus tersebut perlu dilakukan beberapa analisa, berdasarkan pendekatan pertanyaan *Question Approach*.

A. Hak - hak dari bagian Keuangan (Dalam hal ini Profesionalisme sebagai praktisi keuangan) ataupun juga hak - hak lain yang berkaitan dengan laporan keuangan.

- Hak dari Publik dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan sehingga keputusan yang diambil bisa menjadi salah dan tidak akurat.

B. Pelanggaran terhadap Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal.

Berdasarkan atas latar belakang masalah, di perusahaan ini terjadi Pelanggaran terhadap legelitas UU Perpajakan dimana terjadinya manipulasi data hanya untuk menghindar ataupun mengurangi dari tarif Pajak.

Selain dari *Question Approach*, terjadi juga pelanggaran terhadap estetika, seperti :

1. Egoisme etis, seperti terjadinya manipulasi data
2. Utilitarianisme, yaitu Laporan keuangan sebagai laporan pertanggung jawaban, juga sebagai alat pengambil keputusan. Sehingga dengan laporan keuangan yang salah, keputusan yang diambil juga akan menjadi salah.
3. Deontology, dimana Manajemen melanggar kewajibannya

Sedangkan dari sisi Akunatan sendiri, ada beberapa kode yang dilanggar seperti :

1. Tanggung jawab profesi
2. Integritas profesionalisme

3. Kepentingan Publik
4. Objektivitas
5. Teknikal sesuai dengan Akuntan standar

SARAN DAN REKOMENDASI

1. Saran

- a) Keterbukaan komunikasi antara jajaran Manajemen dan Owner harus diperjelas.
- b) Bangun situasi dan kultur kerja yang nyaman dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban masing - masing pihak
- c) Memberikan masukan terhadap Manajemen tentang keadaan Perusahaan terutama di bidang Akuntan / Keuangan Perusahaan dan dampaknya seandainya tidak segera diperbaiki.
- d) Dan untuk Personality/Pribadi harus mengambil sikap yang tegas dengan mengundurkan diri seandainya tidak ada perubahan yang significant terjadi. Karena bukan hanya melanggar hukum dunia akan tetapi juga menyangkut juga masalah keyakinan dan keimanan kita.

2. Rekomendasi

- a) Segera melakukan penggantian Dewan Direksi, Manajemen dan karyawan yang bersinggungan langsung dengan Pelanggaran yang terjadi.
- b) Melakukan Perekrutan kembali terhadap Manajemen yang baru yang mempunyai integritas dan keimanan yang kuat
- c) Membuat program internal audit secara rutin dan berkala, sehingga akan menjadi modal untuk melakukan external audit.
- d) Dengan adanya internal audit kita bisa menyusun kembali laporan keuangan dan memperbaiki data - data yang telah salah selama ini.

“Tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta (menipu) akan menggelisahkan jiwa.(HR. Al Hasan bin ‘Ali)

Jujur adalah suatu kebaikan sedangkan dusta (menipu) adalah suatu kejelekan. Yang namanya kebaikan pasti selalu mendatangkan ketenangan, sebaliknya kejelekan selalu membawa kegelisahan dalam jiwa.

-- TERIMAKASIH --

Nama : Aidil Fitriyah
NIM : 192510049
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen : Dr. H. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

TUGAS PERTEMUAN KETIGA UTS

SOAL STUDI KASUS

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT KAI

1. Latar Belakang Kasus

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada calon investor pada umumnya dan pemegang saham khususnya. Laporan keuangan memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna umumnya untuk pembuatan keputusan. Oleh karena itu, sepatutnya laporan keuangan dapat memenuhi keperluan para pengguna terutama berkaitan dengan validitas informasi tersebut. Informasi yang diberikan seharusnya informasi yang dapat dipercaya. Namun demikian pada prakteknya laporan keuangan seringkali disalahgunakan oleh manajer dengan melakukan manajemen laba.

Manajemen laba adalah intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Dapat disimpulkan, bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen.

Pada perusahaan PT KAI terjadi adanya kecurangan terhadap transparansi kejujuran dalam pengelolaan Kelembagaan ataupun Manajemen. Ini bermuara pada perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dimana Komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 .

2. Permasalahan Kasus

Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar.

Setelah hasil audit Laporan keuangan tersebut diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 :

- Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
- Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

- Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
- Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.
- Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Dari permasalahan-permasalahan di atas terdapat beberapa hal yang dilanggar. Yang pertama dari segi profesionalisme. Pada standar profesional akuntan khususnya terdapat berbagai hal seperti objektivitas dan independensi. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan manajerial dan diaudit oleh akuntan publik harus objektif yaitu memberikan laporan yang sebenarnya, baik angka-angka maupun catatan atas laporan keuangannya dilaporkan secara disclosure. Dan juga independensi akuntan seharusnya diutamakan, akuntan harus bertindak dengan seimbang, tidak boleh berpihak pada manajemen, investor, ataupun pemerintah. Asersi-aseri yang dinyatakan pada catatan atas laporan keuangan harus mencantumkan bukti-bukti, disclosure, existence dan valuation.

Sebelum memberikan pernyataan wajar pada laporan keuangan, seorang auditor seharusnya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu sehingga dapat membuktikan bahwa data-data yang ada pada laporan keuangan tersebut benar. Auditor menelusuri kembali data-data keuangan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan. Apalagi dengan jumlah yang material dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan.

Kedua, dari segi moralitas. Bagi akuntan manajerial perusahaan mungkin saja mengalami berbagai tekanan seperti ancaman pecat, penurunan jabatan, dan sebagainya sehingga menyulitkan ia dalam mengambil keputusan dan membuat laporan keuangan yang objektif. Selain itu, juga mungkin terdapat opportunity bagi akuntan manajerial seperti contingent fee yang mungkin juga tawarannya dapat diterima oleh seorang auditor PT. KAI. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran kode etik akuntan terjadi termasuk manipulasi laporan keuangan.

3. Saran dan Rekomendasi

Untuk Laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004 sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

SOAL TEORI

1. Penting Para Manajer mempelajari Manajemen Keuangan dan Manfaatnya

Tugas manajemen keuangan pada dasarnya yaitu:

- Menganalisis aspek finansial dari semua keputusan
- Menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan

- Menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan
- Mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan
- Menganalisis laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan.

Sehingga manajemen keuangan dapat memanfaatkan pandangan akutansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan saat ini. Manajemen Keuangan mengkonsentrasikan diri pada pernyataan sebagai berikut: “*what do we do now?*” and “*where do we go from here?*”

Manfaat mempelajari Keuangan bagi Manajer Non Keuangan

Dengan mempelajari Keuangan seorang Manajer bisa mengetahui keadaan perusahaan di tempatnya bekerja, sehingga seorang Manajer bisa mengambil langkah ataupun membuat Plan untuk perusahaan tersebut pada periode berikutnya, seperti :

- Pemilihan produk dan pasar perusahaan,
- Strategi yang digunakan untuk penelitian, investasi, produksi dan pemasaran
- Pemilihan, pelatihan, pengorganisasian, serta memotivasi eksekutif dan karyawan lainnya
- Memperoleh dana dengan berbagai biaya yang efisien
- Melakukan penyesuaian terhadap keputusan-keputusan tersebut dengan perubahan lingkungan

2. Posisi Kas yang baik bagi Perusahaan

Posisi Kas yang baik pada perusahaan adalah keseimbangan *Cashflow* yang ada. Keseimbangan suatu perusahaan menjadi tidak terjamin dengan ketidaktersediaan Kas. Akan tetapi dengan Kas yang berlebih pun, suatu perusahaan tidak terjamin untuk *profit* (laba) yang sesuai dengan permintaan Pemilik Perusahaan.

Kas yang baik bagi perusahaan dapat diraih dengan menjaga arus kas yang ada seperti :

- Arus Kas bisnis yaitu menjaga arus Kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik kas pemasukan ataupun kas pengeluaran
- Arus kas dari investasi yaitu aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan
- Arus Kas dari Pendanaan yaitu Kas yang terjaga dari sisi pendanaan seperti Obligasi, Valuta, saham, ataupun yang lainnya.

3. Tujuan didirikannya Perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan Pemiliknya.

Pada dasarnya seorang mendirikan suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai invest yang dia miliki. Makanya seorang yang mendirikan perusahaan akan mencari rekanan yang dapat meningkatkan nilai yang dia invest untuk perusahaan tersebut.

Oleh karenanya pemilik perusahaan akan meminta agar perusahaan dikelola secara profesional, dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran/kekayaan bagi para pemiliknya.

Dan selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang ada di dalamnya, serta pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dapat tercapai. Seorang manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang baik, mengambil keputusan dan pengendalian pengawasan yang efektif dan sesuai dengan fungsinya di dalam perusahaan yakni membentuk sumber modal serta mengopersikannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Nama : Akhmad Jalili

NIM : 192510004

UAS (Ujian Akhir Semester) Manajemen Keuangan

Dilema Seorang Profesional Keuangan

1. Latar belakang kasus

Berkembangnya dunia bisnis saat ini mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin meningkat serta masalah yang muncul menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan informasi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Oleh sebab itu, profesi akuntan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan kelancaran pelaksanaan bisnis. Akuntan berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan, serta mendorong peningkatan good corporate governance. Salah satu tugas yang paling sentral yang biasa dilakukan adalah jasa atestasi atau pemeriksaan. Sejak terkuaknya malpraktik bisnis manipulasi keuangan yang melibatkan akuntan dan menunjukkan bahwa akuntan telah melanggar prinsip dasar etika profesi mereka sebagai seorang akuntan, membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas profesi akuntan. Padahal, profesi ini mendapat kepercayaan dari publik untuk membuktikan kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan kembali dan hal itu sepenuhnya tergantung pada praktek profesional yang dijalankan oleh para akuntan saat ini. Pengambilan keputusan atas laporan keuangan klien sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku akuntan terutama ketika akuntan sedang mengalami dilema etika. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang dimana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Sehubungan dengan keadaan tersebut, seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada standar moral dan etika profesi yang telah ditetapkan. Dalam menghadapi dilema etika, akuntan diharapkan dapat terus berpegang pada kode etik

akuntan yang mengamanatkan kepada para akuntan, bahwa auditor harus mematuhi prinsip dasar yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Dilema etika dapat terjadi ketika munculnya ketidaksepakatan antara auditor dengan klien mengenai aspek fungsi dan tujuan dari pemeriksaan audit. Konflik audit akan berkembang ketika auditor harus mengungkapkan suatu informasi akan tetapi klien tidak menginginkan informasi tersebut dipublikasikan. Dalam keadaan ini, klien dapat mempengaruhi proses audit yang dilakukan oleh auditor. Klien dapat menekan auditor untuk melakukan tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Dalam keadaan seperti ini, auditor dihadapkan pada pilihan-pilihan keputusan yang saling bertentangan terkait dengan aktivitas pemeriksaan yang dilakukannya. Apabila auditor memenuhi tuntutan klien, maka auditor tersebut telah melanggar standar pemeriksaan dan kode etik profesinya. Akan tetapi, apabila auditor memutuskan untuk tidak memenuhi tuntutan klien, maka ia akan mendapat tekanan atau bahkan pemutusan hubungan kerja dengan klien tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan adanya beberapa kasus yang membuktikan bahwa auditor memutuskan untuk menyelesaikan dilema etika yang dialaminya dengan perilaku yang tidak etis. Seperti contoh kasus Olympus. Pada Oktober 2011, Olympus mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun sejak era 1980-an. Selama kurun waktu dua dekade, Olympus membuat laporan palsu seolah-olah perusahaannya dalam keadaan sehat. Olympus juga menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, pada tahun 2008 senilai US\$ 2,2 miliar (Rp 18,7 triliun). Kasus ini juga melibatkan biaya penasihat US\$ 687 juta (Rp 5,83 triliun) dan pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal US\$ 773 juta (Rp 6,57 triliun). Dana-dana tersebut dihapus dari buku dan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdeteksi. Kasus ini tentu menyeret para direksi dan akuntannya untuk tuntutan pidana dengan pasal manipulasi laporan keuangan dari para pemegang sahamnya.

Etika secara harfiah bermakna pengetahuan tentang azas-azas akhlak atau moral. Etika secara terminologi kemudian berkembang menjadi suatu konsep yang menjelaskan tentang batasan baik atau buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa, akan suatu hal untuk dilakukan dalam suatu pekerjaan tertentu. Istilah kode etik kemudian muncul untuk menjelaskan tentang batasan yang perlu diperhatikan oleh seorang profesional ketika menjalankan profesinya. Seperti halnya profesi-profesi yang lain, Akuntan juga mempunyai kode etik yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan-batasan ketika seorang Akuntan menjalankan perannya. Pemahaman yang cukup dari seorang Akuntan tentang kode etik, akan menciptakan pribadi Akuntan yang profesional, kompeten, dan berdaya guna. Tanpa adanya pemahaman yang cukup tentang kode etik, seorang Akuntan akan terkesan tidak elegan, bahkan akan menghilangkan nilai esensial yang paling tinggi dari profesinya tersebut.

Fenomena akan keberadaan kode etik keprofesian merupakan hal yang menarik untuk diperhatikan. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan besarnya tuntutan publik terhadap dunia usaha yang pada umumnya mengedepankan etika dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Tuntutan ini kemudian direspon dengan antara lain membuat kode etik atau kode perilaku. Scwhartz (dalam Ludigdo, 2007) menyebutkan kode etik sebagai dokumen formal yang tertulis dan membedakan yang terdiri dari standar moral untuk membantu mengarahkan perilaku karyawan dan organisasi. Sementara fungsinya adalah sebagai alat untuk mencapai standar etis yang tinggi dalam bisnis (kavali., dkk, dalam Ludigdo, 2007). Atau secara prinsip sebagai petunjuk atau pengingat untuk berperilaku secara terhormat dalam situasi-situasi tertentu.

2. Permasalahan kasus

Terdapat dua faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis, yakni:

- a. Standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Misalnya, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandar udara (bandara). Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat terbuka. Pada kesempatan berikutnya,

pada saat bertemu dengan keluarga dan teman-temannya, yang bersangkutan dengan bangga bercerita bahwa dia telah menemukan dompet dan mengambil isinya.

- b. Orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Misalnya, seperti contoh diatas, seseorang menemukan dompet berisi uang di bandara. Dia mengambil isinya dan membuang dompet tersebut di tempat tersembunyi dan merahasiakan kejadian tersebut.

Dorongan orang untuk berbuat tidak etis mungkin diperkuat oleh rasionalisasi yang dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan berdasarkan pengamatan dan pengetahuannya. Rasionalisasi tersebut mencakup tiga hal yaitu :

- a. Setiap orang juga melakukan hal (tidak etis) yang sama, misalnya, orang mungkin berargumen bahwa tindakan memalsukan perhitungan pajak, menyontek dalam ujian atau menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembelinya bukan perbuatan yang tidak etis karena yang bersangkutan berpendapat bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama.
- b. Jika sesuatu perbuatan tidak melanggar hukum berarti perbuatan tersebut tidak melanggar etika. Argumen tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa hukum yang sempurna harus sepenuhnya dilandaskan pada etika, misalnya seseorang yang menemukan barang hilang tidak wajib mengembalikannya jika pemiliknya dapat membuktikan bahwa barang yang ditemukannya tersebut benar-benar milik orang yang kehilangan tersebut.
- c. Kemungkinan bahwa tindakan tidak etisnya akan diketahui orang lain serta sanksi yang harus ditanggung jika perbuatan tidak etis tersebut diketahui orang lain tidak signifikan, misalnya penjual yang secara tidak sengaja terlalu besar menulis harga barang mungkin tidak akan dengan kesadaran mengoreksinya jika jumlah tersebut sudah dibayar oleh pembelinya. Dia mungkin akan memutuskan lebih baik menunggu pembeli protes untuk mengoreksinya. Sedangkan jika pembeli tidak menyadari dan tidak protes maka penjual tidak perlu memberitahu.

Kode Etik Profesi Akuntan/Profesional Keuangan

Mukadimah prinsip etika profesi akuntan antara lain menyebutkan bahwa dengan seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Sementara itu prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir. Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir tersebut terdeskripsikan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab profesi

Bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

b. Kepentingan publik

Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c. Integritas

Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.

d. Obyektifitas

Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional

yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.

f. Kerahasiaan

Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g. Perilaku profesional

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

h. Standar teknis

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

3. Saran dan rekomendasi

Sebagai seorang professional di bidang keuangan yang bekerja di perusahaan tersebut, saya menyarankan kepada pemilik perusahaan (yang merupakan usaha keluarga/bukan perusahaan publik) agar memperbaiki sistem pencatatan keuangan dan laporan keuangannya. Apabila perusahaan diwajibkan memiliki laporan keuangan audited (terkait kepentingan pihak ketiga, misalnya fasilitas kredit di bank), maka antara laporan keuangan inhouse dan audited harus sama) karena apabila perusahaan memiliki 2 versi laporan keuangan merupakan suatu pelanggaran yang bisa saja berdampak pada perbuatan perdata atau pidana. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka tidak hanya perusahaan

yang akan ditindak, staf yang terlibat tentunya juga akan dimintai keterangan (minimal dipanggil sebagai saksi). Apabila perusahaan tidak mengindahkan saran yang telah disampaikan tersebut, maka tindakan yang saya ambil adalah resign (keluar dari perusahaan tersebut) dan akan mencari pekerjaan di perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip GCG (Good Corporate Governance) secara baik atau dengan menjadi wirausaha sesuai dengan kemampuan keuangan yang saya miliki.

Nama : Akhmad Jalili

NIM : 192510004

UTS (Ujian Tengah Semester) Manajemen Keuangan

Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI

1. Latar belakang kasus :

PT. KAI (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa angkutan Kereta api yang meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi UU No.13/1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan Kereta api di Indonesia.

Pentingnya penerapan Etika Profesi merupakan pedoman yang penting dalam berperilaku yang baik dalam suatu profesi. Belakangan ini banyak sekali pelanggaran dan kecurangan yang timbul akibat penerapan etika profesi yang tidak maksimal. Banyak kecurangan-kecurangan yang timbul karena terkikisnya kejujuran dan kebijaksanaan dalam berperilaku. Disini saya akan ulas mengenai Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI. Hal ini menjadi menarik karena memanipulasi laporan keuangan termasuk pelanggaran etika profesi dibidang akuntan dan bidang akuntansi menjadi pondasi ekonomi yang baik dalam negeri Indonesia ini. Dalam makalah ini penulis akan menjabarkan profil serta kronologi dari kasus Manipulasi Lapoan Keuangan PT KAI.

2. Permasalahan kasus

Dalam kasus tersebut, terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi.

Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp, 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp. 63 Miliar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham, dan komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005, sebagai berikut :

- a. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005.
- b. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standart Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
- c. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih

tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

- d. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi menurut Hekinus bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan.
- e. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa dibuka akses terhadap laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktek. (Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006).

Kesimpulan :

Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti

investor tersebut seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu wajar. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

3. Saran dan rekomendasi

Saran

Menurut saya Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI, berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi saran saya, seharusnya sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Karena profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna

mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus dan tindakan tegas.

Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

- a. Membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
- b. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan perusahaan.
- c. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
- d. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
- e. Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
- f. Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
- g. Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

- h. Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan atautkah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangan dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.
- i. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
- j. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
- k. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

SOAL TEORI :

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, dan apa manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan.
2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

JAWAB :

1. Para manajer perlu mempelajari Manajemen Keuangan, karena berbicara mengenai manajemen keuangan perusahaan, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan manajemen keuangan perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan dan bagaimana manajer keuangan suatu perusahaan melalui keputusan-keputusan yang diambil dapat mencapai tujuan perusahaan. Pengetahuan tentang manajemen keuangan dewasa ini tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau manajer keuangan, tetapi juga penting bagi pihak-pihak lain yang tugas atau kegiatannya secara tidak langsung berkaitan dengan masalah keuangan, seperti manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer sumber daya manusia. Hal ini mengingat tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh manajer selain manajer keuangan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, baik berupa dukungan dana maupun sebagai penghasil dana. Mengingat kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing manajer di dalam suatu perusahaan saling terkait satu sama lainnya dan mempunyai implikasi terhadap bidang keuangan, maka pengetahuan tentang manajemen keuangan perlu dimiliki oleh para manajer lainnya.

Manfaat mempelajari Keuangan bagi manajer non Keuangan adalah :

Keberadaan manajemen keuangan adalah hal yang penting dalam perusahaan. Karena itu, manajemen keuangan dibutuhkan setiap perusahaan, apa pun bidang aktivitasnya. Dengan adanya manajemen, perusahaan dapat memaksimalkan bisnisnya sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal pula.

Dalam perusahaan atau organisasi, manajemen keuangan memiliki sejumlah fungsi, yaitu:

- a. Manajemen keuangan dapat digunakan untuk menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran serta aktivitas-aktivitas lainnya yang berkaitan dalam suatu periode tertentu.
- b. Membuat penganggaran dana secara detail, baik pada bagian pemasukan maupun pengeluaran.
- c. Manajemen keuangan juga berfungsi sebagai pengelolaan keuangan. Dengan begitu, penggunaan dana bisa berjalan maksimal dengan berbagai cara yang ada.
- d. Penyimpanan keuangan, yaitu dengan mengumpulkan dana-dana perusahaan dan menyimpannya secara aman.
- e. Dengan adanya manajemen keuangan, perusahaan dapat mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan.
- f. Pengendalian keuangan dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan atas kondisi keuangan perusahaan dan sistem keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut.
- g. Sebagai pemeriksaan keuangan, dengan melakukan audit secara internal mengenai keuangan perusahaan. Dengan begitu, tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan dana di dalam perusahaan.
- h. Manajemen keuangan juga berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Manajemen keuangan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

2. Posisi kas yang baik bagi perusahaan

Banyak pengusaha yang terjebak pada laba, tapi kurang memerhatikan kas. Perbedaan antara mendapatkan keuntungan dan memiliki keuangan dalam kas yang cukup, yakni Laba adalah angka yang muncul di akun pada akhir tahun, sedangkan kas adalah uang yang dimiliki, baik di bank maupun dalam bentuk *petty cash*. Uang kas ini menentukan apakah perusahaan bisa membayar beban usaha termasuk gaji, tagihan maupun membayar *supplier*. Beberapa perusahaan yang memiliki laba yang bagus, bisa terpaksa menghentikan operasional bisnis mereka karena kehabisan uang kas. Bagaimana pun tanpa uang kas di bank, manajemen tidak akan bisa membayar semua kewajiban usaha dan bisa dipastikan apabila operasional berhenti maka kinerja perusahaan akan terganggu dan mengalami penurunan.

Masalah-masalah manajemen finansial yang berkaitan dengan arus kas terjadi karena arus kas keluar lebih cepat atau lebih banyak dibanding uang masuk. Hal seperti ini biasa terjadi karena berbagai hal, salah satunya kemungkinan terjadi karena perusahaan terlambat dalam melakukan penagihan kepada pelanggan sehingga mengalami penundaan antara waktu untuk membayar bahan-bahan, biaya produksi maupun membayar tagihan *supplier*.

Tagihan tidak bisa menunggu lama, pembayaran yang terlambat akan mengganggu ketersediaan uang kas dalam perusahaan. Perusahaan harus mewaspadaai hal ini dan melakukan pengelolaan yang baik pada keuangan perusahaan. Memerhatikan laba rugi dari proses penjualan memang penting, tapi memiliki uang kas yang sehat, jauh lebih penting sebagai salah satu usaha manajemen finansial penyeimbang untuk terus menjalankan bisnis perusahaan Anda.

Manajemen suatu perusahaan mesti memiliki pengendalian yang jitu dalam mengelola kas. Kas adalah akun yang paling liquid. Semakin banyak nilai uang kas bukan berarti posisi

keuangan perusahaan baik, melainkan bisa jadi perputaran uang perusahaan kurang efektif karena uang kas banyak yang menganggur. Untuk itu seimbangkan kas dengan peristiwa keuangan seperti pengeluaran dan penerimaan agar manajemen finansial perusahaan berada pada zona aman.

Kesimpulannya, posisi kas yang baik bagi perusahaan adalah cukup untuk operasional perusahaan sehari-hari, yakni bisa membayar beban usaha termasuk gaji, tagihan maupun membayar *supplier* dan tidak berlebih (*idle*) karena apabila kurang dapat berdampak pada terhentinya operasional usaha, sedangkan apabila berlebih akan mengakibatkan *idle* (menganggur) karena uang tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dengan diinvestasikan atau diputar untuk kegiatan usaha.

3. Perusahaan didirikan untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya. Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Pemilik perusahaan kadang kala mengalami keterbatasan dalam pengelolaan perusahaan, oleh karena itu pemilik pada sebagian perusahaan menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan kepada pihak kedua yang disebut manajer. Beberapa perusahaan menerapkan manajemen keuangan sebagai salah satu fungsi strategik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan ini ditujukan agar perusahaan mampu menghasilkan keuntungan untuk meningkatkan value of the firm dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Gitman (2006) setiap perusahaan memiliki tujuan untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya (shareholder) dengan jalan memaksimalkan kekayaan pemilik. Manajer yang profesional, diharapkan dapat bertindak atas nama pemilik untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mensejahterakan para pemegang saham. Tetapi

dalam kenyataannya tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang seringkali bertentangan dengan tujuan utama tersebut. Para manajer justru sering kali berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar agen yang disebut dengan Agency conflict. Konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik dan manajer tersebut dapat diminimumkan dengan jalan mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mensejajarkan kedudukan manajer dan pemegang saham adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Dengan adanya kepemilikan manajerial tentu akan mendorong pihak manajer untuk bertindak sejalan dengan keinginan pemegang saham yaitu dengan meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam mencapai kemakmuran pemegang saham. Hal ini dikarenakan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambil dan juga kerugian yang timbul apabila membuat keputusan yang salah. Pihak-pihak yang mendukung perusahaan diantaranya adalah principal dan free agent. Principal adalah pemegang saham dan free agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan (Wahidahwati, 2002). Hubungan antara principal dan free agent dijelaskan dalam suatu teori yang disebut dengan teori keagenan (agency theory). Teori keagenan yaitu teori yang menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan (manajer) dengan fungsi kepemilikan (pemegang saham) dalam suatu perusahaan. Pemisahan yang jelas antara principal dan free agent dapat menimbulkan suatu masalah yang disebut dengan agency conflict atau konflik keagenan. Agency conflict adalah konflik yang timbul antara pemilik dan manajer perusahaan dimana manajer lebih cenderung mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan, contohnya seperti memaksimalkan utilitasnya yang memungkinkan manajer tidak selalu berbuat yang terbaik bagi principal, lebih mementingkan kemakmuran individu, menggunakan fasilitas kantor untuk mendukung gaya hidup yang semuanya dibebankan atas biaya perusahaan. Agency

conflict biasanya terjadi antara manajer dengan pemegang saham, hal ini terjadi karena proporsi kepemilikan perusahaan oleh manajer relatif kecil. Agency conflict dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Namun dengan munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut Agency cost. Biaya keagenan (agency cost) adalah biaya yang timbul karena perusahaan menggunakan hutang dan melibatkan hubungan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan kreditur. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan cara memberikan sebagian saham perusahaan untuk dimiliki oleh manajer. Walaupun tujuan manajer dan pemegang saham sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemegang saham, tetapi kadangkala manajer memiliki pemikiran berbeda dengan pemegang saham yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan pencapaian tujuan tersebut (Masdupi,2005). Perbedaan pemikiran tersebut mengakibatkan asymmetric information (kesenjangan informasi) diantara manajer dan pemegang saham. Hal ini disebabkan karena manajer merasa bahwa manajer lebih mengetahui tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan pemegang saham. Sehingga manajer sering membuat keputusan yang dianggapnya baik, tetapi kadangkala pemikiran tersebut bertentangan dengan pemikiran pemegang saham. (Anom, 2002). Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer disebut dengan managerial ownership (kepemilikan manajerial). Dengan managerial ownership maka persepsi antara pemegang saham dengan manajer akan relatif sama, karena manajer selain sebagai pengelola perusahaan manajer juga sebagai pemilik perusahaan (Anom dan Jogiyanto H, 2005). Manajer diharapkan semakin berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang bersifat oportunistik (kesempatan atau peluang). Karena manajer akan ikut menanggung konsekuensi dari apa yang manajer putuskan (Masdupi, 2005). Managerial ownership dan free agent memiliki peranan yang sangat penting dalam mengendalikan keuangan perusahaan. Managerial ownership dalam

mengendalikan keuangan perusahaan biasanya lebih cenderung mengurangi penggunaan hutang sedangkan free agent dalam kaitannya dengan kebijakan leverage dapat mengambil keputusan yang berlawanan dengan kepemilikan manajerial (managerial ownership) yaitu, keputusan untuk meningkatkan penggunaan hutang. Kecenderungan meningkatkan hutang yang dilakukan oleh free agent juga disebabkan karena free agent menangkap investasi potensial yang dapat meningkatkan profit perusahaan. (Puryandani, 2011) menyatakan bahwa ada perbedaan kebijakan hutang antara managerial ownership dan free agent, bahwa free agent lebih berani dalam menentukan kebijakan hutang dibandingkan pada perusahaan managerial ownership. (Christiawan dan Tarigan, 2007) juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan kebijakan hutang antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan tanpa kepemilikan manajerial.

Nama : Akhmad Riza
NIM : 192510003
M. Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen : DR. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

UJIAN AKHIR SEMESTER

SOAL STUDI KASUS DILEMA PROFESIONAL KEUANGAN

1. LATAR BELAKANG KASUS:

Akuntan merupakan profesi yang memiliki etika dan aturan yang berlaku dalam melaksanakan pekerjaannya. Seorang akuntan dituntut bersifat professional, mempertimbangkan moral dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ada. Tujuan seorang akuntan adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar professional yang tinggi untuk mencapai hasil kinerja yang tinggi serta bersinergi dengan kepentingan publik.

Pada kasus ini adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, penipuan, penyesatan dalam hal penyajian laporan keuangan untuk investor dan stakeholder lainnya dan masalah yang berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan serta dugaan terjadinya hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (*proper*), yakni melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak yang menyebabkan professional seorang akuntan dipertanyakan.

2. PERMASALAHAN KASUS :

Dalam melakukan pekerjaannya sudah seharusnya seorang akuntan diberi kebebasan untuk bekerja sesuai standar akuntansi yang telah ditetapkan, namun dalam praktiknya ada pimpinan yang meminta sorang beberapa akuntan untuk melakukan kecurangan

dalam penyajian laporan keuangan, penipuan, penyesatan dalam hal penyajian laporan keuangan untuk investor dan stakeholder lainnya dan masalah yang berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan serta dugaan terjadinya hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (*proper*), yakni melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yaitu terjadi pertentangan antara etika profesionalisme dan perintah atasan. Dan hal ini membuat seorang akuntan melakukan pelanggaran terhadap prinsip standar kode etik akuntan yakni: Tanggung jawab profesi, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian, Perilaku professional, dan Standar teknis seorang akuntan.

3. SARAN DAN REKOMENDASI :

Saran dari saya yang pertama adalah melakukan pendekatan kepada pimpinan dan pemangku kepentingan dan memberikan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku beserta konsekuensinya, menyampaikan laporan bahwa apabila hal tersebut tetap dilanggar akan tetap diketahui apabila dilakukan, mengajak untuk menciptakan kultur perusahaan yang baik serta mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dan yang kedua adalah tetap melakukan penyajian laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan hasil tersebut pada pimpinan dan pemangku kepentingan dan apabila para pimpinan masih bersikeras untuk tetap pada penyajian laporan keuangan yang salah dan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada maka saya dengan terpaksa mengundurkan diri dari perusahaan, karena hal ini lebih baik, karena apabila ini tetap diteruskan maka profesional saya akan terus dibayangi oleh konsekuensi yang ada terlebih pada konsekuensi hukum.

Nama : Akhmad Riza
NIM : 192510003
M. Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen : DR. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

UJIAN TENGAH SEMESTER

1. LATAR BELAKANG KASUS

PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar, padahal apabila dilihat dan dikaji lebih dalam, PT KAI menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar, dan diduga melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan merupakan suatu bentuk penipuan yang menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Pada kasus ini berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntan.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

Di lain pihak, PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tidak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga, sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT Kereta Api Indonesia sehingga keuntungan sebesar Rp. 6,9 milyar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga, terdapat manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi

pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga disini terjadi permasalahan dalam hal pengakuan pajak pihak ketiga yang diakui sebagai akun pendapatan dan perbedaan persepsi diantara manajemen perusahaan PT KAI.

2. PERMASALAHAN KASUS

Permasalahan yang terjadi pada kasus PT KAI ini berawal dari : 1. Terdapat manipulasi dalam penyajian laporan keuangan yang disajikan oleh PT KAI, 2. Pengakuan pajak pada pihak ketiga yang diakui sebagai akun pendapatan, 3. Perbedaan pandangan atau persepsi antara manajemen PT KAI. serta permasalahan ini didukung oleh tidak berjalannya pengawasan dalam perusahaan dimana hal ini merupakan masalah terpenting untuk mengidentifikasi lebih awal kelemahan dan kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan suatu perusahaan, sehingga bisa dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan dan kesalahan yang sama.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

1. PT KAI harus mengadakan pengawasan secara terbuka dimana pengawasan ini dapat dilakukan oleh semua pihak tidak hanya pada manajemen dan stakeholder saja tetapi masyarakat luas bisa ikut mengawasi PT KAI.
2. PT KAI harus mempunyai wadah yang berguna untuk menampung laporan-laporan atau pengaduan dari setiap pihak yang berkepentingan dalam upaya penyajian laporan keuangan yang lebih baik lagi.
3. PT KAI harus memperbaiki kesalahan tahun sebelumnya, dan kesalahan pada tahun sebelumnya tidak boleh dipertahankan secara konsisten tetapi harus mulai dihilangkan.

4. PT KAI harus dilakukan Audit, Audit disini tidak hanya audit dalam hal penyajian laporan keuangan tetapi harus juga dilakukan audit kinerja pada manajemen PT KAI, karena ini terkait dengan *moral hazard* pada seluruh individu yang terkait dalam pengelolaan PT KAI.
5. PT KAI harus menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan karena beberapa hal dibawah ini diantaranya adalah:
 - a. Para manajer harus bisa menjaga arus kas supaya sesuai untuk membayar semua kewajiban serta beban perusahaan
 - b. Para manajer dituntut untuk dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengambil keputusan yang tepat
 - c. Efisiensi supaya distribusi keuangan tepat di dalam semua aspek yang ada dalam perusahaan
 - d. Mampu mempersiapkan struktur modal yang dapat diperoleh baik dari eksternal maupun internal
 - e. Mampu memaksimalkan kekayaan supaya deviden pemegang saham dan laba ditahan dapat berlangsung terus optimal
 - f. Bisa melakukan pemanfaatan uang secara tepat dan optimal supaya efisiensi terus dapat terjaga.

2. Tiga elemen penting arus kas, yaitu:

a. Kegiatan Operasi (Operating Activities)

Aktivitas yang menimbulkan pendapatan dan biaya dari kegiatan operasional perusahaan yang tercermin dari laporan laba rugi, misalnya kas masuk dari penjualan, kas keluar untuk pembayaran gaji, dsb.

b. Kegiatan Investasi (Investing Activities)

Aktivitas yang terkait dengan aktivitas yang melibatkan investasi seperti pembelian/ penjualan harta tetap perusahaan. Laporan arus kas dalam aktivitas ini juga mencatat aktivitas pemberian pinjaman yang akan menimbulkan piutang serta aktivitas pelunasan pinjaman itu.

c. Kegiatan Pendanaan (Financing Activities)

Aktivitas yang berasal dari transaksi kewajiban perusahaan baik itu penambahan utang maupun pengurangan akibat pelunasan utang. Yang termasuk aktivitas ini adalah penerbitan saham, pembagian dividen, pinjaman obligasi, dan instrumen sekuritas lainnya.

Posisi kas yang baik pada suatu perusahaan dilihat secara sederhana harus memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Operating Activities bernilai positif

Artinya pendapatan lebih besar daripada beban. Jika nilai ini negatif, berarti keadaan sebaliknya. Anda harus fokus pada efisiensi biaya. Jika Anda menjual barang, analisislah tidak larisnya barang Anda agar tidak menumpuk di gudang.

Tingkatkanlah penjualan.

b. Operating Activities = atau > Nilai Laba

Jika keadaannya sebaliknya, berarti uang yang semestinya sudah masuk ke kas/ bank

Anda masih menggantung, misalnya di piutang usaha dari penjualan. Anda perlu analisis metode pembayaran secara kredit/ cicilan dengan memperpendek waktu jatuh tempo pembayaran, mengenakan denda jika lewat jatuh tempo, dan mencegah terjadinya risiko piutang tak tertagih.

c. Operating Activities > Investing Activities

Jika keadaan sebaliknya, berarti perusahaan Anda sedang memiliki banyak utang atau Anda berutang untuk membeli aset yang lain. Jika perusahaan Anda mengalami hal yang sebaliknya dari parameter ini, sudah saatnya Anda menjual aset yang kurang/ tidak diperlukan lagi.

3. Tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan..Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena pemilik atau pemegang saham merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan dikarenakan mereka melakukan penanaman modal atau investasi pada perusahaan, pemilik atau pemegang saham disini mempunyai tujuan antara lain :
 - a. Untuk mempermudah dalam pengelolaan kekayaan yang dimilikinya.
 - b. Memperoleh pendapatan tetap dari hasil laba yang diperoleh oleh perusahaan
 - c. Untuk mengendalikan atau menguasai perusahaan tersebut serta menjaga kelangsungan kesejahteraan pemegang saham.

UTS

Nama : Al Hakim
NIM : 192510023
Kelas : Regular A
Mata Kuliah : Managemen Keuangan
Dosen : Dr. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

JAWABAN STUDI KASUS :

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

1. Latar Belakang Kasus

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp 63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh

akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005

2. Permasalahan Kasus

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus.

Aktivitas manipulasi pencatatan laporan keuangan yang dilakukan manajemen PT KAI tidak terlepas dari bantuan akuntan. Akuntan yang melakukan hal tersebut memberikan informasi yang menyebabkan pemakai laporan keuangan tidak menerima informasi yang *fair*. Seharusnya hal ini tidak akan terjadi apabila akuntan yang melakukan penyajian laporan keuangan ini mempunyai pemahaman, pengetahuan dan menerapkan etika profesi yang dijalankannya sebagai seorang akuntan yang bekerja secara profesional.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang diduga dilanggar oleh manajemen PT KAI yakni :

1. *Competension* : Akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.
2. *Creative Accounting* : Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.
3. *Fraud* : Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

Ini mengisyaratkan bahwa PT KAI belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika akuntan. Dan prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

1. Tanggung Jawab Profesi. Akuntan Internal PT KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.
2. Kepentingan Publik. Akuntan PT KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT KAI terlihat mengalami keuntungan.
3. Akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan. Disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya.
4. Akuntan PT KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seharusnya setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT KAI yang seharusnya menderita kerugian namun laporan keuangan mengalami keuntungan.
6. Perilaku Profesional. Akuntan PT KAI diduga tidak berperilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya karena diduga telah terjadi pelanggaran etik dengan memanipulasi laporan keuangan.
7. Standar Teknis. PT KAI telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan.

Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan, hal itu tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

3. Saran & Rekomendasi

Saran dan rekomendasi saya untuk pemegang saham PT KAI harus segera dilakukan adalah merekrut manajemen baru yang memiliki integritas, moral dan etika yang baik dengan melalui tes kompetensi dan kemampuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Dengan demikian dengan sendirinya akan terbentuk:

1. Perusahaan yang mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
2. Perusahaan yang memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.
3. Perusahaan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance*
4. Perusahaan yang menjalankan *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, yang bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
5. Perusahaan yang menerapkan *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
6. Perusahaan yang menerapkan *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*.
7. Perusahaan yang menerapkan Akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan “proses bisnis” perusahaan.

JAWABAN SOAL TEORI :

1. Mengapa para manajer perlu mempelajari manajemen keuangan, dan apa manfaat mempelajari keuangan bagi manajer non keuangan?

- Untuk Manager Keuangan agar bisa memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan, menjaga aliran dari arus kas (cash flow) perusahaan, mampu mempersiapkan struktur modal, mampu memanfaatkan keuangan yang tepat, mampu memaksimalkan kekayaan perusahaan, mampu meningkatkan efisiensi departemen perusahaan, mampu memproses distribusi keuangan yang tepat dalam semua aspek akan meningkatkan efisiensi seluruh perusahaan untuk kelangsungan hidup dari perusahaan dalam dunia bisnis yang semakin serba kompetitif seperti sekarang ini, mengurangi resiko operasional yang begitu banyak ketidakpastian dalam bisnis agar seorang manajer keuangan bisa mengambil langkah yang lebih tepat supaya dapat mengurangi resiko dan terakhir untuk mengurangi biaya modal untuk merencanakan struktur modal menjadi sedemikian rupa agar biaya modal dapat semakin diminimalkan.
- Untuk Manager Non Keuangan agar manajer terhindar dari manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh bawahannya terutama oleh bagian keuangan perusahaan yang bisa menyebabkan kerugian yang timbul oleh ketidakmampuan manager dalam membaca laporan keuangan. Karena pada dasarnya seorang manajer, atau manajer keuangan sering terlibat dan berinteraksi langsung dengan keputusan-keputusan seperti menganalisis aspek finansial dari semua keputusan, menentukan jumlah investasi yang diperlukan untuk mencapai penjualan yang diharapkan, menentukan bagaimana memperoleh dana yang digunakan untuk mendanai investasi yang direncanakan, mengelola operasional perusahaan sehari-hari yang berkaitan dengan manajemen modal kerja perusahaan, dan menganalisis laporan keuangan (neraca, laporan rugi laba) perusahaan. Jadi inilah alasan mengapa setiap manager harus mengetahui Manajemen Keuangan.

2. Coba anda jelaskan posisi kas yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.

Kas yang seimbang antara arus kas masuk dan arus kas keluar (*Cash Flow*) di suatu perusahaan, karena seimbangnya *Cash Flow* itu menjadi tolak ukur baik tidaknya sebuah perusahaan. Pada dasarnya *Cash flow* (arus kas) merupakan sumber pengetahuan tentang keuangan perusahaan tersebut demi keberlangsungan/existensi perusahaan tersebut dalam sebuah bisnis. Karenanya, penting bagi suatu perusahaan untuk menjaga stabilitas arus kas bisnis/usaha yang mereka kelola agar tetap berada di level yang benar.

3. Tujuan didirikan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya.

Coba anda uraikan maksud dari pernyataan ini.

Pada intinya setiap perusahaan didirikan untuk meningkatkan nilai kekayaan pemiliknya, mengapa bisa demikian karena dalam perusahaan saat pengangkatan direktur, stakeholder biasanya akan memberikan target kepada direktur untuk dapat memberikan keuntungan/laba kepada perusahaan dengan cara apapun yang mereka bisa, apabila direktur mampu mencapai target yang telah ditetapkan biasanya direktur akan mendapatkan bonus-bonus yang sudah disepakati sebelumnya, akan tetapi apabila direktur tidak mampu mencapai target tersebut biasanya direktur akan diganti oleh stakeholder dengan orang yang dianggap mampu memberikan keuntungan/laba yang diinginkan perusahaan. Oleh sebab itu direktur, manajer, karyawan di sebuah perusahaan harus bekerja seoptimal mungkin sesuai dengan post-post masing-masing untuk memaksimalkan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan dan keuntungan perusahaan akan berdampak positif kepada stakeholder. Dan apabila perusahaan mengalami kebangkrutan dan meninggalkan hutang yang mengakibatkan masalah hukum maka permasalahan itu pun bukan menjadi tanggung jawab stakeholder melainkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh direktur kecuali sang pemilik/pemegang saham merangkap jabatan sebagai direktur maka sang pemilik/pemegang saham harus ikut bertanggung jawab yang bisa mengakibatkan penyitaan aset sang pemegang saham.

UAS

Nama : Al Hakim
NIM : 192510023
Kelas : Regular A
Mata Kuliah : Manajemen Keuangan
Dosen : Dr. Bakti Setyadi, S.E, M.M, Ak, CA

JAWABAN STUDI KASUS :

DILEMA SEORANG PROFESIONAL KEUANGAN

1. Latar Belakang Kasus

PT. Amanah Jujur Bijaksana yang bergerak di bidang distribusi pupuk tempat saya bekerja saat ini melakukan kegiatan usaha yang diindikasikan melakukan tindakan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan ganda pada tahun 2018. Kasus ini terjadi karena manajemen perusahaan dikelola oleh manajemen yang tidak proper dibidangnya sehingga mengakibatkan adanya kesengajaan manajemen melakukan pencatatan tanpa bukti, mark up harga pupuk, penggelapan data penjualan pupuk yang semestinya mengalami kenaikan dan menguntungkan banyak laba bagi perusahaan perusahaan dimanipulasi menjadi keuntungan yang lebih kecil dibanding aslinya. Di dalam laporan keuangan tahun 2018 **PT. Amanah Jujur Bijaksana** dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 5,5 Miliar. Namun apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru mendapat keuntungan yang jauh lebih besar yaitu Rp 11 Miliar. Hal ini membuktikan perusahaan telah melanggar hukum karena berusaha menggelapkan keuntungan untuk mengurangi nilai pajak perusahaan.

2. Permasalahan Kasus

Laporan Keuangan **PT. Amanah Jujur Bijaksana** tahun 2018 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan. Kasus **PT. Amanah Jujur Bijaksana** berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang diduga dilanggar oleh manajemen **PT. Amanah Jujur Bijaksana** yakni :

1. Competension : Akuntan manajemen tidak kompetensi karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang

jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

2. *Creative Accounting* : Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.
3. *Fraud* : Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

Beberapa teori etika yang telah dilanggar oleh **PT. Amanah Jujur Bijaksana** yaitu :

1. Egoisme Etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa dia telah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalah gunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.
2. Utilitarianisme. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak (orang yang berkepentingan).
3. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan etika-etika yang diberlakukan.
4. Hak. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan.

5. Keutamaan. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan.

Dalam hal ini **PT. Amanah Jujur Bijaksana** disinyalir telah melakukan pelanggaran Undang-undang No 5 Tahun 2015 tentang akuntan publik yang juga mengatur sanksi pidana bagi akuntan publik dan membuka potensi dipidanakan oleh orang lain yang merasa dirugikan. Misalnya dengan sengaja melakukan perbuatan jahat dengan memalsukan dokumen atau surat (Pasal 263 dan 264 KUHP), atau melakukan penipuan atau kebohongan (Pasal 378 KUHP) atau sengaja membantu melakukan pidana (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP). Pemberian sanksi pidana ini bisa diterapkan sepanjang dapat dibuktikan ketika akuntan menjalankan profesinya.

3. Saran & Rekomendasi

Mengingat saya adalah karyawan keuangan yang bekerja di perusahaan tersebut maka saya akan mencoba menghadap manager **PT. Amanah Jujur Bijaksana** untuk berbicara empat mata dengan manager agar menghentikan praktek manipulasi laporan keuangan perusahaan karena bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dan akan berdampak pidana bagi akuntan yang membuat, manager yang bertanggung jawab, dan direktur perusahaan selaku pimpinan tertinggi perusahaan sedangkan bagi pemegang saham **PT. Amanah Jujur Bijaksana** mereka tidak akan tersentuh hukum selagi mereka tidak merangkap sebagai direksi, akan tetapi apabila manager tidak mengindahkan saran dan pendapat saya, saya selaku profesional keuangan akan mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaan tersebut karena dengan melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut akan bertentangan dengan prinsip-prinsip etika akuntan yang selama ini saya pedomani.

Rekomendasi saya untuk stakeholder agar memberhentikan seluruh karyawan yang terlibat didalam kasus pemalsuan laporan keuangan **PT. Amanah Jujur Bijaksana** dan segera merekrut karyawan dan managemen baru yang memiliki integritas, moral dan etika yang baik dengan melalui tes kompetensi dan kemampuan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Dengan demikian akan terbentuk perusahaan yang mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dengan memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan yang mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi, seperti:

1. Perusahaan yang menjalankan *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, yang bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
2. Perusahaan yang menerapkan *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh auditor eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.
3. Perusahaan yang menerapkan *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*.
4. Perusahaan yang menerapkan Akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan “proses bisnis” perusahaan.

Jawaban soal UTS Manajemen Keuangan:

1. LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT. KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.

4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

2. PERMASALAHAN KASUS

Kasus PT. KAI berawal dari perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dan Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mengenai :

1. Masalah piutang PPN.

Piutang PPN per 31 Desember 2005 senilai Rp. 95,2 milyar, menurut Komite Audit harus dicadangkan penghapusannya pada tahun 2005 karena diragukan kolektibilitasnya, tetapi tidak dilakukan oleh manajemen dan tidak dikoreksi oleh auditor.

2. Masalah beban ditangguhkan yang berasal dari persediaan.

Saldo beban yang ditangguhkan per 31 Desember 2005 sebesar Rp. 6 milyar yang merupakan penurunan nilai persediaan tahun 2002 yang belum diamortisasi, menurut Komite Audit harus dibebankan sekaligus pada tahun 2005 sebagai beban usaha.

3. Masalah persediaan dalam perjalanan.

Berkaitan dengan pengalihan persediaan suku cadang Rp. 1,4 milyar yang dialihkan dari satu unit kerja ke unit kerja lainnya di lingkungan PT. KAI yang belum selesai proses akuntansinya per 31 Desember 2005, menurut Komite Audit seharusnya telah menjadi beban tahun 2005.

4. Masalah uang muka gaji.

Biaya dibayar dimuka sebesar Rp. 28 milyar yang merupakan gaji Januari 2006 dan seharusnya dibayar tanggal 1 Januari 2006 tetapi telah dibayar per 31 Desember 2005 diperlakukan sebagai uang muka biaya gaji, yang menurut Komite Audit harus dibebankan pada tahun 2005.

5. Masalah Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN). BPYDBS sebesar Rp. 674,5 milyar dan PMN sebesar Rp. 70 milyar yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2005.

Terlepas dari pihak mana yang benar, permasalahan ini tentunya didasari oleh tidak berjalannya fungsi check and balances yang merupakan fungsi substantif dalam perusahaan. Yang terpenting adalah mengidentifikasi kelemahan yang ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan untuk menghindari munculnya permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

3. SARAN DAN REKOMENDASI

Berikut ini beberapa solusi yang disarankan kepada PT KAI untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi :

* Komite Audit tidak memberikan second judge atas opini Auditor Eksternal, karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Auditor Eksternal.

* Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan.

* Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan.

* Manajemen menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, akurat dan full disclosure.

* Komite Audit dan Dewan Komisaris sebaiknya melakukan inisiatif untuk membangun budaya pengawasan dalam perusahaan melalui proses internalisasi, sehingga pengawasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap organ dan individu dalam organisasi.

Jadi saya berasumsi berdasarkan dari sumber yang saya baca, terdapat informasi bahwa laporan keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pada beberapa tahun sebelumnya tidak boleh diaudit. Pada tahun 2004 baru laporan keuangan PT. KAI dapat diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan auditor. Sehingga mungkin saja pelanggaran ini telah dilakukan sejak lama dan baru diketahui tahun 2005. Pelanggaran ini merupakan suatu hal yang telah berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Sistem pemeriksaan laporan keuangan mulai tahun 2004, sudah cukup bagus sehingga mulai dapat diketahui beberapa pelanggaran dan dapat diperbaiki. Mengenai auditor yang memberikan pendapat wajar pada laporan keuangan PT. KAI padahal terdapat kesalahan, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Untuk mencegah kejadian ini terulang lagi, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dapat memberikan sanksi dengan membekukan auditor tersebut selama beberapa bulan ataupun sanksi administrasi yang sesuai.

Dan juga dapat melakukan proses audit bertahap, seperti menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh suatu KAP (Kantor Akuntan Publik) ke KAP lain yang tidak saling mengenal sehingga objektivitas pernyataan atas laporan keuangan dapat lebih dipercaya dan juga mengurangi kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Terdapat auditor internal di dalam perusahaan yang independen dan dapat menilai kinerja perusahaan. Auditor internal ini mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PT. KAI sehari-harinya dan memberi tahu atau memperingatkan manajemen jika terdapat penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan.

Solusi selanjutnya, pemerintah tidak membeda-bedakan dan mengistimewakan BUMN dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak manajemen tidak merasa memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Karena kejahatan tidak hanya terjadi karena ada niat dari pelakunya tetapi juga karena ada kesempatan. Dengan lebih memperketat sistem ini, diharapkan pelanggaran-pelanggaran dapat dikurangi.

Selain itu, menumbuhkan kesadaran pada masing-masing individu, seperti manajemen, komisaris, akuntan manajerial, auditor, dan pihak lain yang berkaitan juga sangat penting. Jika masing-masing individu dapat mengendalikan diri akan sangat bermanfaat untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang ada.

JAWABAN SOAL TEORI:

1. Setiap keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki dampak finansial pada perusahaan dan ia harus membuat keputusan ini dalam konteks aktivitas operasional perusahaan secara total sehingga tujuan Manajemen Keuangan bisa benar-benar terealisasi. Untuk membantu membuat keputusan Manajemen Keuangan tercapai, manajer haruslah

menyediakan berbagai laporan yang salah satunya adalah Laporan Anggaran.

Tujuan manajer non keuangan wajib memahami tentang keuangan harus disadari bahwa, dengan semakin sengitnya persaingan bisnis serta diiringi oleh cepatnya perubahan tren saat ini, maka pengetahuan mengenai masalah keuangan seharusnya tidak hanya dipahami finance manager saja namun juga oleh semua manajer yang mengomandoi unit atau divisinya masing-masing.

Alasan lainnya adalah karena kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer tersebut saling terkait satu sama lain dan memiliki implikasi kepada bidang keuangan seperti pemberian dana untuk kegiatan operasional masing-masing unit.

Untuk memahami manajemen keuangan, memang dibutuhkan pengetahuan mengenai akuntansi. Namun perlu diketahui bahwa terdapat perbedaan yang mendasar untuk keduanya.

2. Terdapat tiga elemen penting arus kas dapat dikatakan baik di dalam cash flow, yaitu:

a. Arus kas dari kegiatan bisnis (operating activities)

Arus kas yang pertama ini adalah arus kas yang berasal dari kegiatan bisnis baik pemasukan atau pengeluaran. Contohnya: penerima dari konsumen, membayar gaji bulanan, bayar listrik, dan lain sebagainya.

b. Arus kas dari kegiatan investasi (invest activity)

Arus kas ini berasal dari kegiatan investasi perusahaan baik itu pemasukan atau pengeluaran. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan dan kegiatan yang ada hubungannya dengan piutang perusahaan. Contohnya: pembelian kendaraan baru.

c. Arus kas dari kegiatan pendanaan (finance activities)

Arus kas yang ketiga ini adalah arus kas yang asalnya dari pendanaan yang didapatkan oleh perusahaan. Contohnya: emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya.

3. Salah satu tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, serta memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan.. Peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan.

Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental yaitu:

Perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi), Konsistensi terhadap sistem pemisahan antara manajemen dan pemegang saham dan Perlunya kemampuan perusahaan untuk menciptakan kepercayaan pada penyandang dana ekstern, bahwa dana ekstern tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Sebaiknya tujuan utama mendirikan perusahaan adalah untuk kepentingan perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka perusahaan perlunya memiliki suatu sistem tentang pengelolaan perusahaan yang baik, yaitu yang mampu untuk memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak pemberi pinjaman, sehingga dapat meyakinkan bahwa yang dilakukan oleh

manajemen akan memperoleh hasil atas investasi yang ditanamnya dengan wajar dan nilai tinggi, juga agar dapat meyakinkan terpenuhinya kepentingan karyawan serta perusahaan itu sendiri. Saat ini perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia masih lemah dalam hal pengelolaan perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh masih lemahnya standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban terhadap pemegang saham, pengungkapan dan transparansi dalam proses pengelolaan perusahaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia dalam menjalankan operasional perusahaan yang baik agar dapat memuaskan pemangku kepentingan perusahaan.

Soal Studi Kasus Dilema Profesional Keuangan

1. Latar Belakang Kasus :

Perusahaan tempat saya bekerja sekarang terdeteksi mengalami kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Masalah ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi banyak hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak (proper), misalnya dalam melakukan pencatatan tanpa bukti, melakukan markup harga, membuat laporan keuangan ganda untuk menghindari pajak dan juga semua data penjualan yang tersimpan dalam komputer kantor. Biasanya pemilik perusahaan akan kelabakan ketika didatangi petugas pajak. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan diduga melakukan penggelapan pajak. Semua hal yang terjadi dalam perusahaan saya bekerja sekarang ini diindikasikan melanggar peraturan dan cenderung mengarah ke perbuatan kriminal.

2. Permasalahan Kasus :

Dari latar belakang kasus diatas, maka perlu dilakukan pendekatan analisis *question approach* untuk membahas permasalahan kasus :

I. Analisis 5 Question Approach:

Profitable

- a. Pihak yang diuntungkan adalah perusahaan karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik, walaupun pada kenyataannya terjadi banyak penyimpangan pembukuan.

Legal

Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan usaha adalah 25 %. Besar tarif ini mulai berlaku pada tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berbentuk perseroan terbuka
- b. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
- c. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tariff normal

Right

- a. Hak-hak publik, dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.
- b. Pemerintah, dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

Sustainable Development

Rekayasa yang dilakukan perusahaan saya bekerja bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen

II . Teori Etika yang Dilanggar

Dari kasus diatas, jika dikaitkan dengan teori etika ada beberapa teori yang sudah dilanggar yaitu :

- a. Egoisme etis. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi memajukan dirinya sendiri agar dilihat bahwa sudah sukses mengatur perusahaan. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Tindakannya tersebut tidak hanya merugikan dirinya sendiri tapi juga bagi perusahaan dan orang lain. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan para investor dan calon investor serta merusak citra perusahaan. Sehingga akibatnya perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang bersedia menanamkan modal ke perusahaan.
- b. Utilitarianisme. Tujuan dari laporan keuangan tidak hanya sebagai alat pertanggung jawaban manajemen tapi juga sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan oleh manajemen maka keputusan yang diambil tidak tepat dan bisa merugikan orang banyak.
- c. Deontologi. Manajemen tidak menjalankan kewajibannya sebagai manajemen perusahaan dengan semestinya. Seharusnya seorang manajer yang memiliki kedudukan tinggi diperusahaan memberikan

contoh yang baik kepada bawahan agar menjalankan kewajibannya diperusahaan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

- d. Hak. Teori etika ini berkaitan dengan teori deontologi. Dalam prinsip-prinsip etika profesi seseorang dituntut untuk profesional dalam profesinya. Dalam kasus ini manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti karyawan dan para investor. Yakni seperti para karyawan dan para investor mempunyai hak untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kinerja perusahaan
- e. Keutamaan. Sikap keutamaan yang diperlukan dalam dunia bisnis yakni seperti kejujuran. Pada kasus ini manajemen tidak bersikap jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi seperti data mengenai pendapatan, utang dan cadangan kerugian piutang. Seorang manajer seharusnya mempunyai sikap jujur karena, kejujuran merupakan etika yang harus dimiliki oleh seorang manajer.

Di dalam standar kode etik Akuntan Manajemen, ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen yakni:

a. *Competency*

Akuntan manajemen dalam perusahaan tidak kompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dengan sepatasnya, selain itu tidak mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan melainkan dengan memanipulasi data.

b. *Creative Accounting.*

Akuntan manajemen dalam perusahaan telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan.

c. *Fraud.*

Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya.

III. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

a. **Tanggung jawab profesi ;**

Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan internal kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan berbeda dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

b. Kepentingan Publik ;

Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga yang seharusnya untuk menghindari pajak. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, karena jika ketahuan maka perusahaan dapat diberikan denda oleh pemerintah.

c. Integritas ;

Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

d. Objektivitas ;

Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

e. Kompetensi dan kehati-hatian profesional ;

Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan internal perusahaan tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang disengaja, mengakibatkan pelaporan pajak tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

f. Perilaku profesional ;

Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan internal perusahaan tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

g. Standar teknis ;

Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

IV. Sikap Yang Diambil :

1) Manajemen Perusahaan

- a. Melakukan koreksi penyajian laporan keuangan, baik secara internal (untuk melihat kondisi riil dalam perusahaan sendiri apakah perusahaan sedang laba atau rugi) dan eksternal (pelaporan ke dirjen pajak)
- b. Membujuk manajemen untuk mengadakan konferensi pers dan meminta maaf kepada *stakeholders* serta berjanji akan segera memperbaiki kondisi perusahaan dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang.

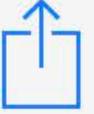
2) Saya Pribadi

- a. Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan berupa saran dan rekomendasi baik secara lisan maupun tulisan mengenai kondisi perusahaan sekarang dan dampaknya jika tidak segera diperbaiki
- b. Akan segera mengundurkan diri dari perusahaan saya bekerja sekarang dan mencari perusahaan yang manajemen dan lingkungan perusahaan jauh lebih sehat daripada sekarang.

3. Saran dan Rekomendasi :

1. Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.
2. Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi.
3. Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.
4. Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5. *Good Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Good Corporate Governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.
6. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.
7. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangn dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.
8. Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (*enforcement*) tanpa ada pengecualian yang tidak masuk akal
9. Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain di atasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan
10. Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.



Nama : Arlini Sutrisno
Kosentrasi : Manajemen Sumber Daya Manusia
Angkatan : 34
NIM : 192510040
Kelas : Reguler A

1. Laporan keuangan memiliki peranan yang penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan dapat bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam perihal perusahaan kali ini dikelola dengan manajemen yang kurang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan keuangan tidak dilakukan secara layak, misalnya pencatatan tanpa bukti, markup harga, pencatatan transaksi yang tidak semestinya serta membuat laporan keuangan ganda yang bertujuan untuk menghindari nilai pajak yang harus dibayar. Sehingga untuk menutupi perbuatan kriminal ini pemilik lebih mementingkan kepentingan pribadi agar accounting mau melakukan praktek-praktek yang tidak sehat dengan cara melanggar standar akuntansi keuangan.
2. Dalam kasus ini atasan mengajak Saya (accounting) untuk bekerjasama menggandakan laporan. Ini merupakan masalah mendasar yang masih sering sekali dilakukan, khususnya mengenai penggelapan besarnya nilai pajak yang harus dibayar dengan cara membuat laporan keuangan ganda. Dimana laporan keuangan seharusnya menjadi sumber informasi keuangan yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang sehat.
3. Akuntan tidak memegang teguh etika profesinya maka ia akan tercoreng tidak baik dan terlihat buruk. Akuntan manajemen pada suatu perusahaan bertugas untuk melakukan pencatatan atas segala transaksi serta mengatur dan menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Akuntan manajemen juga berperan dalam mengurus masalah pencatatan pajak perusahaan serta auditing. Jika pencatatan saja kurang baik maka sudah dipastikan perusahaan tersebut sudah melakukan tindakan kriminal dan ini mempengaruhi etika profesi sebagai akuntan yang wajib bersifat professional, yang harus selalu mempertimbangkan mengenai moral dan profesional dalam segala aktifitas yang dikerjakan. Maka saya menyarankan untuk mundur dari perusahaan tersebut dan mencoba pada perusahaan yang lebih baik lagi.